

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ARMAN ANI

NIM: 018416841

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Arman Ani

Universitas Terbuka

Armanani@mail.ut.ac.id

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Mutu Pendidikan

Arman Ani, NIM 018416841, Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, dibimbing oleh Bapak Wempy Banga dan Bapak Karsadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :(1) Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. (2) Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. (3) Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini adalah untuk menyajikan data dan menarik kesimpulan tentang implementasi kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, mengkaji secara kualitatif, bagaimana Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, telah dilaksanakan dan telah berjalan selama lima tahun terakhir, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini tersebut terjadi karena (1) Kemampuan Sumber Daya pelaksana belum mampu melaksanakan program dana BOS dengan baik sesuai yang telah ditentukan. (2) perencanaan yang belum baik sehingga sehingga program BOS masih sering dipakai untuk kegiatan yang mendesak yang tidak direncanakan. (3) relatif kurangnya murid dalam satu sekolah yang menyebabkan kurangnya biaya BOS yang diberikan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal.

ABSTRACT

The Implementation of policy School Operational Assistance Program in Elementary School upgrade Education Quality in Kulisusu District North Buton Regency

Arman Ani
Universitas Terbuka

Armanani@mail.ut.ac.id

Keyword: Implementation, policy, Education Quality

Arman Ani, 018416841, The Implementation of policy School Operational Assistance Program in Elementary School upgrade Education Quality in Kulisusu District North Buton Regency, guided by Mr. Wempy Banga and Mr. Karsadi.

This research purpose to analyze the Implementation of policy School Operational Assistance Program in Elementary School upgrade Education Quality, the supporting factors Implementation of policy School Operational Assistance Program in Elementary School upgrade Education Quality in Kulisusu District North Buton Regency and the efforts to doing by the department of education and school in solving the problems.

This research is qualitative method. The using of method are data provide and giving conclusion about The Implementation of policy School Operational Assistance Program in Elementary School upgrade Education Quality in Kulisusu District North Buton Regency in inteviw and observation by informan.

The Result of research indicate that the Implementation of policy School Operational Assistance Program in Elementary School upgrade Education Quality in Kulisusu District North Buton Regency, have been executed and have walked during five the last year, but its execution not yet optimal. The matter happened occur because (1) Ability of executor resource not yet able to execute the School Operational Assistance Program better as have been determined, (2) the planning program is not yet optimal of School Operational Assistance Program because its often using the urge program, like purchasing of stationery and appliance of study supporter which sometimes isn't planned, inclusive of stocktaking of medium and education infrastructure which not yet optimal, (3) relative the lack of pupils in one school causing the lack of operating expenses education given, because amount of expense of Operation Education adapted for by a existing pupil amount in one school, and also use of medium and especial supporter education which not yet optimal.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulissu Kabupaten Buton Utara” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kendari, 23 Januari 2015
Yang Menyatakan



(ARMAN ANI)
NIM 018416841

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Penyusun TAPM : ARMAN ANI

NIM : 018416841

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Januari 2015

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si
NIP. 19561110 198501 1 001

Pembimbing II,



Prof. Dr. Karsadi, M.Si
NIP. 19650307 199102 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **ARMAN ANI**
NIM : **018416841**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Judul Tesis : **Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 23 Januari 2015**
Waktu : **16.00 – 18.00 Wita**

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : **Drs. Wawan Ruswanto, M.Si** ()

Penguji Ahli : **Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si** ()

Pembimbing I : **Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si** ()

Pembimbing II : **Prof. Dr. Karsadi, M.Si** ()

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing Prof. Dr. Wempy Banga M.Si selaku pembimbing satu dan Prof.Dr. Karsadi, M.Si. selaku pembimbing dua yang telah banyak mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian hingga terwujudnya tesis ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Suciati, M.Si., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Drs. Wawan Ruswanto, M.Si, Kepala UPBJJ-UT Kendari selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
3. Bapak Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Karsadi, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.
4. Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik Bapak Dr. Darmanto ,M.Ed selaku penanggungjawab Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik.
5. Bapak Prof. Dr. Martani Huseini, M.Si sebagai penguji ahli dan Drs. Wawan Ruswanto, M.Si sebagai ketua komisi penguji yang telah banyak memberikan

arahan dan bimbingan hingga selesainya penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

6. Drs. Fahrul Muhammad, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara yang berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian terutama para Kepala SDN di Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulisusu yang telah memberikan informasi kepada penulis mulai awal hingga akhir penelitian ini dilaksanakan sekaligus memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian di wilayahnya
7. Bapak Raimundus Suparjo, S.Pd, selaku KUPTD Kecamatan Kulisusu dan seluruh pegawainya telah memberikan bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian dan proses pengambilan data penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini
8. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak La Ani dan Bunda Tersayang Wa UTU yang telah melahirkan, membesarkan serta senantiasa mendo'akan ananda setiap saat. Juga kepada saudara-saudaraku tercinta, Hasni Ani, Lisman Ani, Amir Syarifudin Ani, S.Sos, Gafri Ani, S.Ip, dan Ardin Ani, AMKL yang senantiasa memberikan motivasi selama ini baik sebelum menempuh studi maupun dalam proses studi.
9. Kedua Mertua Penulis Bapak H. La Muza dan Ibu Hj. Samriah, yang telah banyak mendukung studi dan senantiasa mendoakan saya setiap saat. Juga seluruh anaknya yang mendoakan setiap saat Zaimudin, Zarlin, A.Ma, Asmadin, Asrudin, S.Pd, Almin, AMAK dan Sri Astuti yang senantiasa pula memberikan segala motivasi dan bantuannya mulai dari awal hingga proses studi ini selesai.
10. Seluruh rekan-rekan se-almamater dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namanya, atas curahan pemikiran dan diskusi

yang hangat serta dorongan bagi penulis untuk secepatnya menyelesaikan pendidikan Program Pasca sarjana ini.

11. Secara Terkhusus, Penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Istriku tersayang **Fitriati,AMK**, serta anakku tercinta dan tersayang **Adelia Maisarah Arman**, atas segala pengertiannya kepada Penulis untuk mengikuti kuliah di Program Pascasarjana Universitas Terbuka, terima kasih atas doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Pada penulisan TAPM ini, penulis menyadari masih banyak terdapatnya kekurangan dan kekeliruan baik materi yang tercakup didalamnya, maupun tata cara penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran serta masukan demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

Akhirnya, semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran serta menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama. Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Kendari, Januari 2015

Penulis

Arman Ani

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Konsep dan Teori Implementasi	10
2. Konsep Keberhasilan Implementasi	19
3. Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan.....	25
4. Bantuan Operasional Sekolah	28
5. Konsep Peningkatan Mutu Pendidikan	35
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Pemikiran	44

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
B. Jenis Penelitian	48
C. Informan Penelitian	48
D. Tehnik Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Letak Lokasi Penelitian	54
2. Kondisi dan Jumlah SD di Kecamatan Kulisusu	59
3. Kondisi dan Jumlah Guru SD Negeri di Kecamatan Kulisusu	60
4. Kondisi dan Jumlah Siswa SD Negeri di Kecamatan Kulisusu ...	61
5. Jumlah Dana BOS yang Diterima setiap SD di Kecamatan Kulisusu 5 Tahun Terakhir (2009 – 2013)	62
B. Implementasi Kebijakan Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Meningkatkan Mutu Pendidikan	63
C. Faktor – faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	67
D. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOS	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. KESIMPULAN	120
B. SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Penelitian	46
2. Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4.1 Luas Wilayah dan persentase Tiap Desa/Kelurahan	55
2. Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kulisusu	58
3. Tabel 4.3. Jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu	59
4. Tabel 4.4. Jumlah Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu	60
5. Tabel 4.5. Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu	61
6. Tabel 4.6. Jumlah dana BOS Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu 5 tahun terakhir	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Matriks Hasil Wawancara	125
2. Lampiran Penggunaan dana BOS	128
3. Lampiran Foto Penelitian	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara dimana pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan suatu pembangunann yang merata bagi setiap warga negaranya. Sifat pendidikan itu kompleks, dinamis dan kontekstual oleh karena itu pendidikan bukan hal yang sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu membutuhkan keseriusan karena pendidikan melibatkan aspek kognitif, afektif dan keterampilan yang membentuk diri seseorang secara keseluruhan menjadi manusia seutuhnya.

Salah satu usaha pemerintah yang sangat penting dan mendasar yaitu upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mengupayakan terlaksananya secara sungguh-sungguh satu system pendididkan nasional. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal dan pada pasal 31 ayat (3) menegaskan : “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Sehubungan dengan Otonomi Daerah dan desentralisasi pendidikan, Indra Djati Sidi pada buku "*Manajemen Berbasis Sekolah*" yang ditulis E.Mulyasa, mengemukakan 4 isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu dikonstruksi berkaitan mutu pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut :

1. Upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan.
2. Peningkatan efisiensi pengolahan pendidikan mengarah pada pengolahan pendidikan berbasis sekolah guna optimalisasi sumberdaya.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat.
4. Pemerataan pelayanan pendidikan yang mengarah pada pendidikan yang berbasis kedalam (E. Mulyasa, 2002 : 7)

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti meningkatkan prestasi belajar siswa baik prestasi akademik dan prestasi ekstrakurikuler adalah berupa tanggung jawab pendanaan. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat". Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban besar mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.

Salah satu kebijakan pembangunan pendidikan yaitu peningkatan akses bagi anak usia 7 – 15 tahun terhadap pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar (WAJAR) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Depdiknas dan Depag 2006 : 71). Sementara itu kenyataannya yang ada dalam masyarakat masih banyak anak yang sekolah berasal dari golongan tidak mampu. Hal ini mempengaruhi semangat anak untuk melanjutkan studi. Apabila hal itu terjadi

maka dapat menghambat upaya penuntasan Progeam Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah, maka pada periode Juli 2005 pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan berbentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dengan hasil dan prestasi belajar yang baik sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 tahun.

Adanya program pemerintah yakni Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) ini tentunya memberikan dampak pada pengelolaan keuangan masing-masing sekolah. Penggunaan dana pendidikan yang semula diterapkan tentunya berubah pula. Untuk itu setiap sekolah yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mengubah dan beradaptasi guna penyesuaian pola dan fungsi manajemen yang dijalankan sebelumnya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat mendukung Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat memberikan otonomi dan pemberian fleksibilitas yang besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Penggunaan dana pendidikan sebelum dan sesudah bergulirnya Program (BOS) terdapat perbedaan. Sebelum memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beban keuangan seluruhnya ditanggung oleh komite sekolah, tetapi setelah memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka pihak

sekolah terkurangi beban keuangan dalam pengelolaan keuangan. Sekolah semula mendapatkan pembiayaan pendidikan dari internal sekolah yang bersangkutan. Hal ini juga dialami oleh Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka pihak sekolah memperoleh bantuan sehingga meringankan beban keuangan sehingga mempengaruhi dalam proses pembelajaran demi meningkatkan prestasi belajar siswa dan mutu pendidikan.

Dalam segala aktivitas termasuk aktivitas di sekolah masalah keuangan adalah sangat penting, karena suatu rencana kegiatan atau aktivitas didukung dengan dana keuangan yang memadai, maka rencana tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Masalah keuangan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Masalah keuangan dapat menentukan lancar tidaknya suatu kegiatan karena setiap kegiatan pasti ada alokasi dana. Demikian juga kegiatan pembelajaran di sekolah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan. Semakin baik kondisi keuangannya maka semakin mudah dalam mencapai tujuan. Sebaliknya apabila kondisi keuangan kurang baik maka dalam pencapaian tujuan bisa tersendat. Dengan adanya bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah diharapkan segala kegiatan yang ada di Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dapat berjalan dengan baik dan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran yang berimplikasi pada meningkatnya mutu pendidikan dapat tercapai dengan baik karena penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Sekolah merupakan lembaga formal tempat siswa mengembangkan kemampuan dirinya. Disinilah peran sekolah dalam memaksimalkan setiap kemampuan siswa sehingga menghasilkan prestasi yang cemerlang. Berbicara mengenai prestasi sangatlah luas. Pihak pengelola pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai sumber daya yang berkualitas sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional, maka seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, siswa, sarana prasarana dan fasilitas sekolah menjadi sangat strategis dalam pencapaian prestasi belajar.

Dengan masuknya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan mutu pendidikan disekolah dasar negeri dikecamatan kulisusu, melalui dana tersebut tidak ada alasan pihak sekolah untuk kekurangan lagi sarana pendidikan, kurikulum, strategi, metode, bahkan guru yang berpengalaman dan profesional karena dana BOS tersebut dapat dipakai untuk kebutuhan peserta didik dan pelatihan pengembangan profesi guru melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) bagi kepala sekolah.

Pihak sekolah dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tenang dan kondusif dengan dukungan yang diberikan pemerintah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dapat mengoptimalkan semangat dan minat anak-anak, yang pada akhirnya akan mampu berprestasi dengan baik dengan meningkatkan prestasi belajarnya menuju mutu pendidikan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru pada Sekolah Dasar Negeri 38 Kulisusu, SD 23 Kulisusu dan SD 13 Kulisusu diperoleh bahwa rata-rata prestasi belajar siswa yang mereka ajar pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah berada pada nilai 67, 72 dan 70 dimana nilai ini masih berada pada kategori sedang. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut pihak guru telah berusaha untuk meningkatkan strategi pembelajarannya, tetapi hal ini kurang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, guna meningkatkan prestasi belajar siswa pada khususnya dan prestasi sekolah pada umumnya yang lebih baik lagi misalnya alat peraga untuk mata pelajaran IPA, IPS, matematika serta media pembelajaran dan buku-buku penunjang lainnya. Belum semua siswa dapat mengakses buku pelajaran baik dengan membeli sendiri maupun dengan meminjam disekolah. Keterbatasan buku dan alat peraga IPA, IPS dan matematika secara langsung berdampak pada sulitnya anak menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari demi meningkatkan prestasi belajarnya.

Atas kebijakan dari pihak sekolah dan komite sekolah di Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperoleh sekolah ini digunakan untuk membeli/memperbaiki sarana dan prasarana yang diperlukan, namun belum optimal disediakan oleh pihak sekolah itu sendiri misalnya pembelian alat peraga yang digunakan untuk mata pelajaran IPA, IPS dan Matematika di Sekolah Dasar.

Peningkatan kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah diharapkan dapat membantu kelancaran dan peningkatan prestasi belajar siswa. Jadi penerimaan dana BOS di

SD di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara diharapkan dapat digunakan secara efektif demi meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan.

Secara empirik berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun 2009-2014 diperoleh beberapa permasalahan terkait dengan pendidikan di Kabupaten Buton Utara, antara lain: (1) layanan pendidikan formal bagi masyarakat belum optimal; (2) belum optimalnya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan non formal; (3) Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah yakni 31,89%; (4) APK SMA/MA/SMK baru 43,15%, APM baru 34,65%; (5) lebih dari 15% masukan SD tidak melalui TK; (6) masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas; (7) ada 45% sekolah kekurangan buku pelajaran; (8) sekitar 16% sekolah memiliki rata-rata nilai ujian kurang dari 6; (9) ada 8,08% sekolah memiliki jumlah guru kurang dari 60 guru; (10) rasio guru/buku kurang dari 1:1; (11) masih banyak tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4, bahkan banyak sekolah yang masih menggunakan jasa guru honorer; (12) belum memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM); (13) Sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama perpustakaan dan laboratorium serta fasilitas pendukung masih kurang dan bahkan laboratorium belum ada; (14) distribusi guru sekolah khususnya dipelosok/pedesaan belum memadai; (15) partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah pinggiran masih relatif kurang; (*Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, 2014*).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang: “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) dalam peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?
2. Faktor - faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara?
3. Upaya - upaya apa saja yang dilakukan Oleh Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.
3. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak Sekolah dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan dibawah ini :

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai implementasi kebijakan sektor pendidikan dan dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Buton Utara. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian lain yang menyangkut pembangunan sektor pendidikan khususnya menyangkut percepatan peningkatan kualitas pendidikan baik formal maupun nonformal dan dapat juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam merumuskan kebijakan publik..

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah kabupaten Buton Utara maupun pihak terkait dalam melakukan pelaksanaan program BOS tahun berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep dan Teori Implementasi.

Implementasi merupakan salah satu kegiatan dalam proses atau siklus kebijakan. Menurut pandangan beberapa para ahli yang disampaikan oleh :

Dunn (2000: 16) menyatakan bahwa :

“Siklus kebijakan itu terdiri atas *Agenda setting, policy formulation policy adaption, policy implementation, policy assessment*”. Pada garis besarnya, kegiatan-kegiatan utama dari siklus kebijakan tersebut terdiri atas : “perumusan kebijakan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasi kebijakan”.

Pendapat lain tentang implementasi yang disampaikan oleh :

Mustopadidjaja, (2002: 25) menyatakan bahwa :

“Implementasi merupakan proses perumusan kebijakan yang salah satu tahapan paling penting dalam pembuatan kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan sangat ditentukan dalam implementasinya”.

Pandangan tersebut kedua diatas memberi gambaran bahwa implementasi dapat dipandang sebagai proses atau *general process* yang dilakukan setelah suatu tujuan ditetapkan, kegiatan itu terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi seperti yang diungkapkan oleh :

Van Mater dan Van Horn (1991: 447) mengatakan bahwa :

“*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one time efforts to*

transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”.

Terminologi implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn tersebut menekankan pada suatu tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan secara rinci proses implementasi kebijakan yang disampaikan oleh :

Mazmanian & Sabatier (1981: 20) Mengatakan bahwa :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata, baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan yang dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang yang bersangkutan.

Dengan bertumpu pada pendapat tersebut, maka dapatlah diambil suatu pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan

organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Pada prinsipnya walaupun implementasi bervariasi diantara tingkat isu kebijakan, namun jika ada tingkat konsensus yang tinggi dan tidak banyak dibutuhkan perubahan apalagi bila menyangkut kebutuhan yang mendesak dan didukung pula oleh kemampuan implementor yang handal yang dapat mengimplementasikan kebijakan secara baik dan benar maka implementasi kebijakan akan lebih sukses. Oleh sebab itu, untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan, dapat di evaluasi dari sudut kemampuan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah pelaksana yang secara nyata dalam mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya dengan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Wibawa,(1994: 35) menyatakan bahwa :

“Implementasi kebijakan pada dirinya sendiri mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan alternatif - alternatif yang abstrak atau makro. Sedangkan formulasi kebijakan dalam pengertiannya yang steril, merupakan proses yang memiliki logika *bottom up* dalam: arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan atau pengakomodasian tuntutan lingkungan, lalu diikuti dengan pencarian alternatif cara pemecahannya”.

Pendapat lain tentang implementasi seperti yang diungkapkan oleh :

Dunsere, (1978: 61) menyatakan bahwa :

“Dinamakan sebagai *implementation gap* Suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang kenyataannya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan)”.

Apabila pengertian diatas dikaitkan dengan kebijakan, maka implementasi dapat dipandang sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan. Pada suatu proses atau siklus kebijakan,

implementasi pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang bersifat teoritis.

Williams,(1976: 75) menyatakan bahwa :

“Sebagai *implementation capacity* dan organisasi atau aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* adalah kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai”.

Pandangan lain tentang proses implementasi diungkapkan pula oleh

Stillman, (1976: 123), menyatakan bahwa :

“Implementasi mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan dengan *performance* yang cukup kompleks dengan memadukan berbagai sumber kekuatan yang tersedia agar dapat mendukung pelaksanaan implementasi program, sehingga program-program yang telah didesain dapat terukur keberhasilannya”.

Implementasi sebagian besar pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat atau pejabat lapangan dalam memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu : (1) pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the centre atau pusat*) (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); dan (3) aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program

dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dan semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan, maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi sebagai suatu proses kegiatan, untuk keberhasilannya diperlukan peraturan, sumber daya dan proses administratif. Adapun siapa yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, hal ini dikemukakan oleh :

Van Horn dan Van Meter, (1979: 51) menyatakan bahwa :
“those action by public or private, individuals (groups) that are directed at the achievement of objectives set path in pair policy decisions” Bahwa proses implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Implementasi merupakan tindak lanjut yang bersifat praktis dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan yang bersifat praktis itu dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana sehingga dimungkinkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dapat dicapai.

Menurut Jones (1995:294), menyatakan bahwa :
“Implementasi dalam bentuknya yang abstrak, menyeluruh menyelesaikan pekerjaan dan melakukannya. Oleh karenanya dalam implementasi ini karena sifatnya melakukan akan lebih banyak memerlukan tenaga kerja, uang dan kemampuan organisasional dan apa yang telah ada”.

Proses implementasi ini juga merupakan proses menyelesaikan pekerjaan dan melakukannya oleh karena itu implementasi bersifat melakukan, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh :

Mustopadijadja (2002:10) menyatakan bahwa:
“Proses implementasi program kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis dan operasional

yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program (kebijakan) yang ditetapkan semula”.

Implementasi kebijakan berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan, yaitu kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik menyangkut usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Uraian tersebut mengandung pengertian bahwa fungsi dan tujuan implementasi kebijakan ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan sarana kebijakan negara dapat diwujudkan sebagai “*policy delivery system*”

Wahab, 2004: 123 menyatakan bahwa :

“Maksudnya, sistem penyampaian atau penerusan kebijakan negara yang terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian, kebijakan negara pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran dan berbagai macam sarana yang diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang biasa disebut petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak). Selanjutnya program-program itu dapat diperinci ke dalam bentuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan, dalam hal ini proyek-proyek tersebut merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan”.

Maksud utama dan program tersebut dan masing-masing proyek yang tercakup di dalamnya dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan terutama dalam, lingkungan kebijakan, yaitu suatu perubahan yang diklaim dan diperhitungkan sebagai hasil akhir (*outcome*) dari program atau proyek tersebut. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan lebih bersifat praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut karena menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut. jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan,

hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan respon terhadap kebijakan. Pengaruh implementasi kebijakan akan terlihat setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan, berhasil dan tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan ditentukan dalam implementasinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh :

Hoorgerwerf (1978:162) menyatakan bahwa :

“Secara ringkas mendefinisikan pelaksanaan kebijaksanaan sebagai penggunaan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan yang dipilih. Definisi ini bukan berarti, bahwa dengan penetapan suatu kebijakan seluruh tindakan-tindakan sudah ditentukan secara keseluruhan dalam suatu program. Dengan demikian dalam pelaksanaannya, keberhasilan implementasi kebijakan banyak tergantung bagaimana menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, sehingga mampu mengukur berapa besar keberhasilan program yang dilaksanakan. Sebaliknya akan menemui kegagalan jika menempatkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan”.

Ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yang sering dijumpai antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif karena komitmen (nilai) yang rendah di kalangan pelaksana. Faktor-faktor politik atau waktu yang kurang tepat serta bermacam alasan lainnya turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan atau program hingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

Stillman, (1976: 123), mengemukakan 5 teori utama tentang implementasi:

1. *Implementasi as a linear process*

Implementasi meliputi proses linear yang terdiri atas enam variabel yang meningkatkan kebijakan dengan *performance* : (a) standar dan tujuan; (b) sumber daya; (c) komunikasi dan aktivitas antara-organisasi; (d) karakteristik agen-agen implementasi; (e) kondisi ekonomi, dan politik, (f) sikap dari pelaksana.

2. *Implementation as politics of mutual adaptation*
Besarnya perhatian, komitmen dan dengan dan sektor utama memiliki pengaruh besar terhadap prospek keberhasilan. Dengan kata lain dukungan politik dari atas adalah kunci keberhasilan dan kegagalan implementasi program.
3. *Implementasi as gamesmanship*
Implementasi meliputi seluruh gamesmanship. mempelajai aturan main, merumuskan taktik dan strategi mengontrol aliran komunikasi dan mengatasi apabila terjadi krisis dan situasi tidak menentukan.
4. *Implementation as a circular policy leadership process* (Nakamura and Smallwood). Elemen kritis yang menghubungkan implementasi kepada proses kebijakan yang lainnya adalah kepemimpinan (*leadership*), dimana kepemimpinan penting untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dalam tiga elemen yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi.
5. *Implementasi as contingency*
Implementasi merupakan proses interaktif terus-menerus yang kompleks (*complex continuing interactive proses*), yang meliputi interaksi dengan lingkungan, stimulasi kebijakan program dan hasil (*outcome*), yang keseluruhannya tergantung kepada muatan spesifik, dan waktu terjadinya.

Teori implementasi selalu dikaitkan dengan rencana program, artinya yang diimplementasikan adalah suatu rencana atau program. Penggunaan implementasi dalam konteks rencana, biasanya yang dimaksud adalah rencana program yang berjangka menengah dan panjang. Adapun untuk rencana tahunan biasanya disebut dengan pelaksanaan rencana. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh :

Salusu (1996: 409) menyatakan bahwa :

“Implementasi sebagai seperangkat kegiatan yang menyusun suatu rencana. Suatu rencana selalu dimaksudkan untuk pencapaian suatu sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu diperlukan serangkaian aktivitas. Tanpa implementasi, setiap program tidak mempunyai apa-apa”.

Pandangan lain Edward’s (1980: 1) menegaskan bahwa :

“Implementasi adalah bagaimana mengantarkan maksud yang sesungguhnya dari pembuat keputusan. Kebijaksanaan menjadi dampak positif bagi masyarakat yang telah ditetapkan bagi sarannya”.

Berdasarkan kedua Teori implementasi diatas selalu dikaitkan dengan rencana program, artinya yang diimplementasikan adalah sesuatu rencana atau program. Penggunaan implementasi dalam konteks rencana biasanya yang dimaksudkan adalah rencana program jangka menengah dan jangka panjang. Adapun untuk rencana tahunan biasanya disebut dengan pelaksanaan rencana.

Tahap implementasi ini sangat krusial karena kebanyakan kebijakan bersifat tidak terwujud dengan sendirinya, harus diwujudkan oleh berbagai pihak agar mempunyai dampak yang diharapkan, hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh :

Jones (1991: 293) mengatakan bahwa sebuah kebijakan yang dibuat oleh aparat yang berwenang berada pada wilayah politis, harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan itu.

Higgins dalam Salusu (1996: 409) mengatakan bahwa : Implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran. Kegiatan ini menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai karyawan lini paling bawah. Implementasi mencakup kegiatan dan tindakan, yang dilakukan oleh bermacam ragam aktor dengan menggunakan berbagai macam peralatan sehingga sasaran yang dikehendaki dapat tercapai. Implementasi adalah suatu proses yang terarah dan terkoordinasi yang melibatkan banyak sumber daya.

Lineberry dalam Putra (2003: 81) menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut: (1) penjabaran kebijakan ke dalam berbagai aktivitas operasional pelaksanaan (2) pengorganisasian aparat pelaksana (3) pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan (4) koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran (5) pembagian tugas di dalam dan diantara badan pelaksana.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas bahwa Implementasi adalah keseluruhan aktifitas pelaksanaan yang dilakukan oleh para aktor yang berwenang dalam institusi pemerintahan guna merealisasikan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Dengan demikian implementasi program merupakan rancangan kerja yang telah ditentukan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan.

2. Konsep Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan Implementasi merupakan tahapan akhir kegiatan yang berada diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Hal ini seperti yang ungkapkan oleh :

Mustopadidjaja, (2002: 25) mengatakan bahwa :

“Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrat untuk bertindak. Hal ini mengandung makna bahwa suatu kebijakan publik hanya sebuah dokumen politik apabila tidak diikuti dengan tindakan kongkrit. Padahal suatu kebijakan dirumuskan dengan maksud untuk - mengakomodasikan tuntutan berbagai pelaku dan itu berarti bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi masa depan untuk memuaskan kepentingan berbagai pelaku tersebut”.

Kondisi ini secara logis hanya akan terealisasikan bilamana pemerintah mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya disertai dengan manajemen yang memadai, hal ini diungkapkan pula oleh :

Wahab (2004:62) mengemukakan bahwa :

“Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya). Kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijaksanaannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijaksanaan itu memang bernasib jelek (*bad luck*)”.

Kebijakan yang telah ditafsirkan menjadi kebijakan operasional seperti proyek berisi bukan hanya tujuan yang perlu dicapai oleh pemerintah melainkan secara rinci telah menyebutkan alokasi dana, personil dan sumber daya lain yang diperlukan. Implementasi program memiliki prosedur kerja yang harus diikuti untuk mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam hal ini organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan objektif dari masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan berbagai sumber dan memobilisasikannya untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga *output* program tersebut akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Gambaran tersebut terlihat bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan organisasi pelaksana sangat berperan dan hal ini dapat diwujudkan apabila organisasi pelaksana memiliki kemampuan menginterpretasikan program dan menjadikan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran menjadi keputusan organisasi.

Hogwood dan Gunn (1984: 199-200) mengemukakan bahwa :
Beberapa persyaratan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna agar implementasi dapat berhasil yaitu:

1. *The circumstances, external to the implementing agency do not impose trifling constraints;*
2. *That adequate time and sufficient resources are made available to the programmed;*
3. *That the required combination of resources is actually available.*
4. *That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect;*
5. *That relationship between cause and effect is direct and that there are few if any intervening link;*
6. *That dependency relationship are mmimal;*
7. *That there is understanding of and agreement on objectives;*
8. *That tasks are fully specified in correct sequence;*
9. *That there is perfect communication and coordination;*

10. That those in authority can demand and obtain perfect compliance.

Uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa keberhasilan implementasi itu dapat dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Aspek yang pertama bertalian dengan tiga kegiatan yang harus dilakukan karena ketiga kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai pilar-pilar implementasi. Kegiatan-kegiatan itu yaitu: organisasi, interpretasi dan aplikasi. Aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan unsur-unsur pokoknya, yaitu: organisasi pelaksana, program (kebijakan) dan kelompok sasaran. Selanjutnya aspek yang ketiga berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam implementasi.

Smith (1977: 202-205) mengatakan bahwa :
“Keberhasilan implementasi sebagai proses atau alur. Model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith tersebut terlihat bahwa proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran”.

Pandangan diatas menggunakan model teoritisnya dalam bentuk sistem dimana suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan menuju kepada suatu keberhasilan, maka interaksi di dalam dan diantara keempat faktor tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dan akan menimbulkan tekanan atau ketegangan dari berbagai pihak yang kurang sesuai dengan keinginan. Ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut menghasilkan pola-pola interaksi, yaitu pola-pola tidak tetap yang berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan-balik dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Pendapat lain yang mendukung keberhasilan implementasi seperti yang diungkapkan oleh :

Edward III (1980: 9-10), mengemukakan bahwa :

“Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi yaitu ada empat faktor, 1. Komunikasi, 2. Disposisi atau sikap pelaksana, 3. Kualitas Sumber Daya Manusia, 4. Struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain”.

Pendapat lain yang mendukung tentang keberhasilan implementasi kebijakan seperti yang disampaikan oleh :

Menurut Grindle (1980: 23) bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*)”.

Dari pendapat tersebut diatas diperoleh gambaran bahwa keberhasilan implementasi tidak terlepas dari sikap pelaksana bagaimana mengkomunikasikan suatu proses kegiatan, untuk keberhasilannya diperlukan peraturan, kualitas sumber daya manusia, proses administrasi, lingkungan serta isi sebuah kebijakan.

Ada dua aspek dari organisasi sebagai pelaksana yang mempengaruhi keberhasilannya suatu kebijakan yaitu : struktur dan proses organisasi seperti yang disampaikan oleh :

Siagian, (1994: 229) mengatakan bahwa :

“Hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dilaksanakan agar mendukung terhadap kelancaran implementasi kebijakan, struktur organisasi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga segala permasalahan pelebagan berbagai kegiatan tertampung dengan baik. Struktur yang tepat akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses kewenangan dan tanggung jawab dari setiap personil atau unit kerja dalam organisasi, sehingga dapat dipahami arus kerja yang harus dilaksanakan. Selanjutnya mengenai proses organisasi hal ini menunjukkan mekanisme kerja dalam mengkoordinasikan, mempengaruhi dan mengawasi kegiatan. Melalui proses organisasional di dalam organisasi dapat diciptakan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi”.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahkan dapat

dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan seperti yang disampaikan oleh :

Jones (1995: 293-294) mengatakan bahwa :

“Keberhasilan Implementasi berarti bahwa implementasi kebijakan terpisah dengan formulasinya, melainkan keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri. Karena implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi, melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan itu diperoleh kelompok-kelompok sasaran. Maka untuk mencermati proses implementasi kebijakan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan”.

Pandangan diatas sebagai pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu menerangkan bagaimana implementasi itu harus dilakukan agar memberikan hasil dan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi dalam kaitannya dengan organisasi pelaksana, diperlukan perhatian khusus dari para analis untuk melihat kinerja organisasi pelaksana, dan terhadap model implementasi kebijakan. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam organisasi pelaksana kebijakan yaitu:

1. Berkaitan dengan internal organisasi; yaitu tingkat penerimaan kebijakan oleh organisasi pelaksana karena berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan dan kelayakan politis, serta akan berdampak terhadap eksternal organisasi.
2. Berkaitan dengan struktur organisasi dan keterlibatan organisasi; yang meliputi stabilitas struktur organisasi, kohesi atau kepaduan organisasi dan kreativitas dalam organisasi.

3. Berkaitan dengan hubungan antara kebutuhan dan tujuan individual dalam organisasi dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi itu sendiri.

Dengan demikian faktor lingkungan akan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, menurut Smith bahwa faktor lingkungan dapat menjadi penghambat yang harus diatasi melalui suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Untuk kebijakan yang berbeda, akan meliputi faktor sosial budaya, kondisi politik dan kondisi ekonomi yang berbeda pula. Sebagai contoh tentang kebijakan yang berkaitan dengan kemandirian pemerintahan di dunia ketiga, budaya dasar dan model kehidupan sosial atau gaya hidup sosial pada tingkat desa akan menjadi lingkungan penghambat yang sangat besar.

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode (*methods*) yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments*).

3. Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan

Perencanaan pembangunan bidang pendidikan merupakan langkah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya karena hanya melalui pendidikan masyarakat bisa mengembangkan dirinya.

Menurut Coimbs (1987: 5) mengatakan bahwa :
“Kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah penggunaan analisis yang rasional dan sistematis terhadap proses pembangunan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan tujuan murid-murid dan masyarakat”.

Sedangkan perencanaan pendidikan menurut pandangan lain yang disampaikan oleh :

Soenarya (2000: 61) mengatakan bahwa suatu kegiatan jauh melihat kedepan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas dan pembiayaan sistem pendidikan sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat ditemukan beberapa unsur penting dalam perencanaan pembangunan pendidikan Unsur tersebut antara lain : *pertama*, penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis; *kedua*, proses pembangunan pendidikan; *ketiga*, prinsip efektifitas dan efisiensi; *keempat*, kebutuhan, tujuan murid dan masyarakat.

Dalam menggunakan analisis yang rasional dan sistematis, maka hal ini menyangkut metodologi perencanaan yang berkembang dari tahun ketahun. Proses pembangunan pendidikan artinya bahwa perencanaan dilakukan dalam rangka reformasi pendidikan yaitu suatu proses dari masa sekarang menuju perkembangan yang dicita-citakan. Dalam prinsip efektifitas dan efisiensi perencanaan pendidikan sangat dipengaruhi dalam pemikiran ekonomi seperti penentuan sumber pembiayaan, hubungan pembangunan pendidikan dengan

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebutuhan, tujuan murid dan masyarakat artinya perencanaan pendidikan mencakup aspek internal dan eksternal organisasi sistem pendidikan.

Ada lima proposisi yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan pendidikan yang disampaikan oleh :

Coimbs (1987: 28-29) mengatakan bahwa :

“Lima proposisi tersebut antara lain *pertama*, pembangunan pendidikan harus menggunakan pandangan jangka panjang; *kedua*, perencanaan pembangunan harus terperinci; *ketiga*, perencanaan pembangunan pendidikan harus diintegrasikan dengan rencana ekonomi yang luas dan pembangunan masyarakat; *keempat*, perencanaan pembangunan pendidikan harus merupakan suatu kegiatan integral pengelolaan pendidikan dan *kelima*, perencanaan pembangunan pendidikan harus memperhitungkan segi kualitatif”.

Pendapat lain tentang perencanaan pembangunan bidang pendidikan

didukung oleh :

Vebrianto (1985: 45) mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaan pembangunan pendidikan terdapat beberapa masalah. *Pertama*, bagaimana menentukan prioritas tujuan dan fungsi sistem pendidikan dan masing-masing sub-sistemnya; *kedua*, cara mana yang terbaik dalam mencapai tujuan dan fungsi; *ketiga*, berapa banyak sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu bangsa atau masyarakat dipruntukan bagi pendidikan dalam bandingannya dengan biaya yang diperuntukan bagi hal lainnya; *keempat*, siapa yang harus membiayai pendidikan; *kelima*, bagaimana keseluruhan sumber-sumber yang diperuntukan bagi pendidikan di alokasikan diantara berbagai taraf, jenis dan komponen dalam sistem pendidikan”.

Berkaitan dengan hal diatas perencanaan jangka panjang, perencanaan pembangunan pendidikan dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Perencanaan yang terperinci, harus bersifat komprehensif yaitu meliputi keseluruhan dalam suatu sistem pendidikan dengan bagian-bagiannya, seperti pendidikan formal dan nonformal. Pada integrasi perencanaan pendidikan dan ekonomi yang luas perencanaan pendidikan harus merupakan bagian dari perencanaan masyarakat.

Untuk tercapainya efektifitas dalam pengelolaan pendidikan, proses perencanaan harus berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Sedangkan dalam memperhitungkan segi kualitatif, perencanaan pendidikan harus lebih relevan, efisien dan efektif.

Untuk tingkat nasional pembangunan di bidang pendidikan selain bertujuan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat disetiap jenjang, juga bertujuan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini masih belum menunjukkan hasil sebesar yang dicapai pada upaya perluasan daya tampung dan pemerataan (Propenas 2000-2004). Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagai mana di atur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk jenjang sekolah dasar (SD-MI), pemerintah daerah berperan cukup besar terutama dalam penyediaan sarana, prasarana dan personil. Pada jenjang pendidikan dasar ini, sarana fisik sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan kualitas pendidikan menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional melalui mekanisme kontrol di tingkat kabupaten/kota.

Menurut Soenarya (2000: 94) mengatakan bahwa beberapa aspek dalam perencanaan pembangunan pendidikan adalah, aspek kuantitatif, aspek kualitatif aspek relevansi, dan aspek efisiensi.

Substansi aspek kuantitatif adalah aspirasi dan permintaan masyarakat terhadap pendidikan. Pada aspek kualitatif, menekankan pada kualitas pendidikan.

Dalam aspek kualitatif ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu, *pertama*, proses berjalan yang berjalan efektif, dengan ditunjang oleh sumber daya pendidikan dan lingkungan kondusif, *kedua*, peserta didik menunjukkan tingkat kemampuan prestasi belajar. Aspek relevansi, melekat dengan perkembangan kemajuan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam kurung waktu tertentu. Sedangkan aspek efisiensi dapat dilihat dari sudut pandang, efisiensi internal dan eksternal sistem pendidikan. Efisiensi internal ditandai oleh tinggi rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang, sedangkan efisiensi eksternal merujuk pada efektifitas manajemen sistem pendidikan secara keseluruhan.

4. Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bagian dari dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar Nasional Pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Untuk menunjang kesuksesan Wajib Belajar 9 Tahun pemerintah melakukan berbagai upaya nyata. Sejak program itu resmi dicanangkan pada tahun 1994, dan dipertegas kembali pada tahun 2012, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mendongkrak kualitas pendidikan sehingga diharapkan generasi muda Indonesia tidak hanya mendapatkan pendidikan minimal Sekolah Menengah

Pertama (SMP), tetapi juga mempunyai kualitas yang mumpuni. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kemudian disusul dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di khawatirkan akan menurunkan kemampuan penduduk miskin. Hal ini lebih lanjut akan menghambat upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dasar pertimbangan inilah yang kemudian melahirkan pemikiran tentang pentingnya kebijakan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang kemudian lebih di kenal dengan sebutan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut buku panduan Bantuan Operasional Sekolah (Depdiknas, 2012:4) Dijelaskan bahwa tujuan dari program PKPS-BBM dalam bentuk dana BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Sasarannya adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP baik Negeri maupun swasta di seluruh provinsi seluruh Indonesia.

Model pembiayaan pada BOS terdiri atas: biaya satuan pendidikan (BSP), biaya satuan pendidikan investasi, biaya personil, dan biaya operasional sekolah (BOS). Berdasarkan buku panduan Bantuan Operasional Sekolah (2012: 7), biaya satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang di perlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dari cara penggunaannya BSP di bedakan menjadi BSP investasi dan BSP operasional. BSP investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang.

BSP operasional mencakup biaya personal dan biaya non personal. Di jelaskan pula dalam buku panduan (2012: 7) bahwa personal meliputi biaya untuk kesehatan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), uang lembur) dan pengembangan profesi guru (pendidikan dan pelatihan guru, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), kelompok kerja guru (KKG), dan lain-lain. Biaya non personal adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Selain dari biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personal yang di tanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Khusus mengenai bantuan operasional sekolah (BOS) menurut buku panduan (2012 : 8) secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personal hasil studi badan penelitian dan pengembangan, Departemen pendidikan Nasional. Namun karena biaya satuan yang di gunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS di mungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan

biaya investasi. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah\madrasah dan kesejahteraan guru harus di biayai dari sumber lain, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat yang mampu.

Selanjutnya, menurut buku panduan bantuan operasional sekolah (Depdiknas, 2012: 3) juga di jelaskan bahwa :

kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 2009-2013 meliputi: peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan wajib belajar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Tuntutan inilah pula yang menjadi kewajiban pemerintah untuk terus membantu pembiayaan dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Sementara itu dikaitkan dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dijelaskan bahwa :

Setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Adanya ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus dan wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD-MI) dan sekolah menengah pertama (SMP-MTS) serta satuan pendidikan yang sederajat.

Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti meningkatkan prestasi belajar siswa baik prestasi akademik dan prestasi ekstrakurikuler adalah berupa tanggung jawab pendanaan. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban besar mengalokasikan dana untuk penyelenggaraann pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta.

Di dalam buku panduan Bantuan Operasional Sekolah (Depdiknas, 2012: 4) di jelaskan bahwa besar dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

1. SD\MI\SDLB Rp. 580.000,- per siswa\tahun
2. SMP\MTs\SMPLB Rp. 710.000,- per siswa\tahun.

Meskipun demikian, dalam buku panduan bantuan operasional sekolah tersebut (Depdiknas, 2006: 8) juga menjelaskan bahwa dalam operasionalnya penggunaan dana BOS ini di mungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya operasional (personil dan non personil) dan biaya investasi. Namun demikian, prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesehjatraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Biaya non operasional yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana BOS adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (PBM), evaluasi\penilaian, perawatan dan pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Adapun rambu-rambu dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sekolah penerima dana BOS, berdasarkan buku panduan bantuan operasional sekolah (2012: 8) adalah sebagai berikut:

1. Semua sekolah negeri dan swasta, khusus sekolah swasta harus memiliki izin operasional. Sekolah yang bersedia menerima dana BOS harus menandatangani perjanjian penerima bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksana.
2. Sekolah kaya \mapan yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari pada dana BOS, mempunyai hak untuk menolak

dana BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melakukan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksana. Keputusan atas penolakan dana BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut.

Selanjutnya, menurut buku panduan bantuan operasional sekolah (Depdiknas, 2012: 9) di jelaskan pula bahwa sekolah yang telah menyatakan menerima dana BOS di bagi menjadi dua kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis. Bagi sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan kepada semua peserta didik.
2. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bagi sekolah yang masih memungut pungutan pada periode sebelumnya yang dikarenakan (RAPBS) dan dana BOS sekolah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan atau sumbangan atau iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut.
 - b. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurai semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

Ketentuan lain yang perlu dijelaskan dalam konsep ini adalah menyangkut mekanisme pengalokasian dana BOS.

Menurut buku panduan bantuan operasional sekolah (Depdiknas, 2006: 9), menjelaskan bahwa pengalokasian dana BOS dilakukan sebagai berikut:

- a. Tim PKPS-BBM pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim PKPS-BBM propinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian menetapkan lokasi dana BOS tiap Propinsi.
- b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim PKPS-BBM pusat membuat lokasi dana BOS tiap Propinsi yang dituangkan dalam DIPA Propinsi.
- c. Tim PKPS-BBM Propinsi dan tim Kabupaten/Kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa setiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi setiap sekolah.
- d. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui surat keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kandepag Kabupaten/Kota dan dewan pendidikan dilampiri dengan daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima dana BOS harus menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).
- e. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota mengirimkan SK alokasi dan BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM Propinsi, tembusan ke Pos/Bank dan sekolah penerima BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS setiap sekolah menurut buku panduan Operasional Sekolah (Depdiknas, 2012) perlu mempertimbangkan bahwa dalam

satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda sehingga perlu acuan yang jelas.

5. Konsep Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah, maka pada periode Juli 2005 pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan berbentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dengan hasil dan prestasi belajar yang baik sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 tahun.

Menurut Hadis dan Nurhayati (2010: 2) mengatakan bahwa :

“Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan tinggi secara sfesifik dilihat dari perspektif makro dapat disebabkan oleh buruknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumber daya manusia”.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan SDM yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang.

a. Hakekat Mutu

Menurut Crosby (dalam Hadis dan Nurhayati, 2010: 85) mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

Menurut Deming (dalam Hadis dan Nurhayati, 2010:85) mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.

Pandangan lain tentang peningkatan mutu bagi satuan pendidikan dalam pandangan yang disampaikan oleh :

Zamroni (2007: 2) dikatakan bahwa :

“peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien”.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan perubahan mutu tersebut diperlukan peningkatan atau perubahan keterampilan tenaga kerja, proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi dan melebihi harapan konsumen serta sebuah proses untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar tujuan tingkat satuan pendidikan dapat tercapai

b. Upaya peningkatan mutu pendidikan

Kendatipun demikian beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sebagai berikut: (1) Pemberdayaan sekolah (satuan pendidikan) secara optimal, (2) Pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan secara nasional, dapat dilakukan oleh pusat (baik oleh departemen atau lembaga independen) yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengujian, (3) Optimalisasi pemanfaatan lembaga penjamin mutu pendidikan(LPMP) terutama di daerah, (4) Peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan kecakapan (*life skills*).

Pemberdayaan sekolah (satuan pendidikan) secara optimal, barangkali kita sependapat bahwa ujian adalah berfungsi menentukan kelulusan siswa, dapat dilaksanakan oleh sekolah tetapi tetap mengacu pada standar kemampuan yang telah ditetapkan dalam standar nasional. Untuk menghindari insiden diskriminasi terhadap suatu provinsi tertentu, perlu digunakan satu standar kelulusan dengan peringkat tes yang dimiliki tingkat kesulitan yang sama untuk semua wilayah. Berikan kesempatan kepada masing-masing provinsi, sekolah untuk menentukan standar kelulusan yang lebih rendah atau lebih tinggi atas dsar keputusannya sendiri. Ujian sekolah juga berfungsi mengendalikan mutu pendidikan. Ini yang justru dirasakan semakin penting dalam era desentralisasi. Bahkan ada yang menilai bahwa ujian sekolah seperti ini menjadi sarana ampuh untuk menilai akademis yang dikembangkan oleh sekolah dengan standar yang ditetapkan pusat, penilaian lainnya sesuai dengan amanat pasal 3 Sisdiknas juga dapat dipotret dengan baik.

Pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan secara nasional, dapat dilakukan oleh pusat (baik oleh departemen atau lembaga independen) yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengujian, Dalam pasal 58 Sisdiknas jelas disebutkan bahwa evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, sedangkan evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Merujuk pandangan tersebut, pemerintah bisa mengembangkan model ujian secara nasional yang benar-benar mampu memotret mutu pendidikan secara

nasional dalam rentang waktu dan metode tertentu. Jika ujian yang dilakukan secara nasional tidak untuk menentukan kelulusan siswa namun untuk memotret/memetakan mutu pendidikan secara nasional dan dapat dilakukan kapan saja atau uji sampling. Dengan demikian akan mendapatkan potret mutu pendidikan dengan sebenarnya, dan bukan hanya sandiwara belaka, karena tidak dibayang-bayangi dengan ancaman ketidak lulusan dan biaya yang harus dikeluarkan jika banyak siswa yang mengulang. Karena memang bukan untuk meluluskan atau menidakluluskan siswa, akan tetapi dalam kerangka pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan secara nasional. Kendatipun bukan berarti bahwa dengan cara tersebut tidak memiliki kekurangan akan tetapi tidak seperti cara sebelumnya.

Optimalisasi pemanfaatan lembaga penjamin mutu pendidikan(LPMP) terutama di daerah dalam era persaingan semakin tajam, tidak ada satupun yang mampu mengelak kecuali terlibat didalamnya baik itu secara individu, secara kelompok ataupun melalui kelembagaan. Di semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya. Tentunya sangat berbeda dari era sebelumnya. Pendidikan sebagai salah satu pilar utama untuk memberikan kemampuan atau kecakapan atau kekuatan untuk memenangkan persaingan tersebut melalui pembentukan paradigm baru berupa sistem pendidikan yang dipakai tiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam LPMP agar memenuhi tugasnya dalam merealisasikan kesetaraan pendidikan nasional di setiap daerah dalam rangka menindak lanjuti kurikulum tahun 2013 seperti yang diharapkan pemerintah : (1) pengendalian manajemen (2) Struktur organisasi (3)

sumber daya manusia (4) Dana , (5) sarana dan prasarana (6) kelengkapan data (7) pengawasan.

Peningkatan mutu pendidikan melalui pendidikan kecakapan (life skills). Dengan kesadaran semua pihak bahwa salah satu penyebab terdepaknya luaran pendidikan di era persaingan diseluruh aspek kehidupan dipanggung internasional adalah karena tidak adanya kecakapan hidup yang dimiliki oleh setiap luaran pendidikan kita. Hal ini ditandai oleh banyaknya alumni SMA dan perguruan tinggi tidak mampu memposisikan diri dilapangan pekerjaan atau menganggur. Apalagi ketika dituntut untuk mendirikan lapangan kerja guna menampung teman-temannya atau sesama pencari kerja. Padahal kemampuan akademinya cukup memadai, tapi toh tidak mampu bersaing dilapangan pekerjaan. Andaikata mereka memiliki kecakapan hidup maka mereka mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi semua permasalahan yang dihadapi.

c. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita perlu melihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan masukan ilmiah ahli itu, pemerintah tak berdiam diri sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai.

Peningkatan mutu pendidikan seperti yang disampaikan oleh :

Hadis dan Nurhayati (2010: 3) mengatakan bahwa :

“Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional”.

Pandangan lain tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan seperti yang diuraikan oleh :

Sagala (2007: 99) mengatakan bahwa :

“Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik kearah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif tetapi memiliki juga kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat”.

Berdasarkan kedua pandangan diatas bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan harus memperhatikan beberapa hal yaitu : faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, metode pembelajaran, strategi, guru yang profesional, pembiayaan pendidikan, manajemen pendidikan dan sarana lain yang bisa digunakan oleh peserta didik dalam rangka peningkatan mutu mutu pendidikan.

Beberapa penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum dapat secara langsung memberikan efek perbaikan mutu. Di antaranya adalah usaha peningkatan mutu dengan perubahan kurikulum dan proyek peningkatan lain; Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Proyek Perpustakaan, Proyek Bantuan Meningkatkan

Manajemen Mutu (BOMM), Proyek Bantuan Imbal Swadaya (BIS), Proyek Pengadaan Buku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dengan memperhatikan sejumlah proyek itu, dapatlah kita simpulkan bahwa pemerintah telah banyak menghabiskan anggaran dana untuk membiayai proyek itu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam perspektif mikro atau tinjauan secara sempit dan khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan ialah guru yang profesional dan guru yang sejahtera (Hadis dan Nurhayati, 2010: 3) Oleh karena itu, guru sebagai suatu profesi harus profesional dalam melaksanakan berbagai tugas pendidikan dan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan yang diamanahkan kepadanya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Burhanuddin, 2013 “Analisis Efektivitas Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana efektivitas kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe.

Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif, penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas

kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, mengkaji secara kualitatif, bagaimana seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan obsevasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan, namun belum optimal, hal teresbut terjadi karena (1) Kemampuan sumber daya pelaksana belum mampu melaksanakan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik sesuai yang telah ditentukan, (2) perencanaan yang belum baik sehingga Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih sering dipakai untuk kegiatan yang sifatnya mendesak seperti pembelian alat tulis dan alat penunjang pembelajaran yang terkadang tidak direncanakan, (3) relatif kurangnya murid dalam sad sekolah yang menyebabkan kurangnya biaya operasional sekolah yang diberikan, karena jumlah BOS disesuaikan dengan jumlah murid yang ada dalam satu sekolah.

2. Muis, 2012, Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Abuki).

Permasalahan dalam penelitian adalah : (1) Apakah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan, (2) Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Penigkatan Mutu Pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan menganalisis pengaruh variabel implementasi kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai variabel bebas (independent variabel) terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu selain menggambarkan dan mendeskripsikan fakta empirik yang ditemukan di lapangan juga akan melakukan analisis inferensial antara variabel bebas dan variabel terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan baik kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap peningkatan mutu pendidikan pada unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pendidikan kecamatan abuki kabupaten konawe. Sesuai hasil penelitian bahwa semakin banyak murid dalam suatu sekolah maka dana bantuan operasional sekolah (BOS) akan lebih banyak, dengan demikian pembiayaan operasional sekolah juga akan lebih baik, sehingga mutu pendidikan yang diharapkan lebih optimal.

Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pemberian bantuan terhadap sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta fokus bantuan pendidikan yang berbeda, pada penelitian terdahulu fokus bantuannya diarahkan kepada siswa penerima bantuan, sedangkan penelitian ini fokus kebijakan bantuan diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap kebijakan publik standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana, menurut Edward III (1980: 9-10) dikemukakan bahwa komunikasi memegang peranan penting, karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, dengan tepat dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan, dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Edward III bahwa dalam pemberian kebijakan ada empat syarat yang harus dipenuhi antara lain : (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) sumber daya, dan (4) struktur birokrasi.

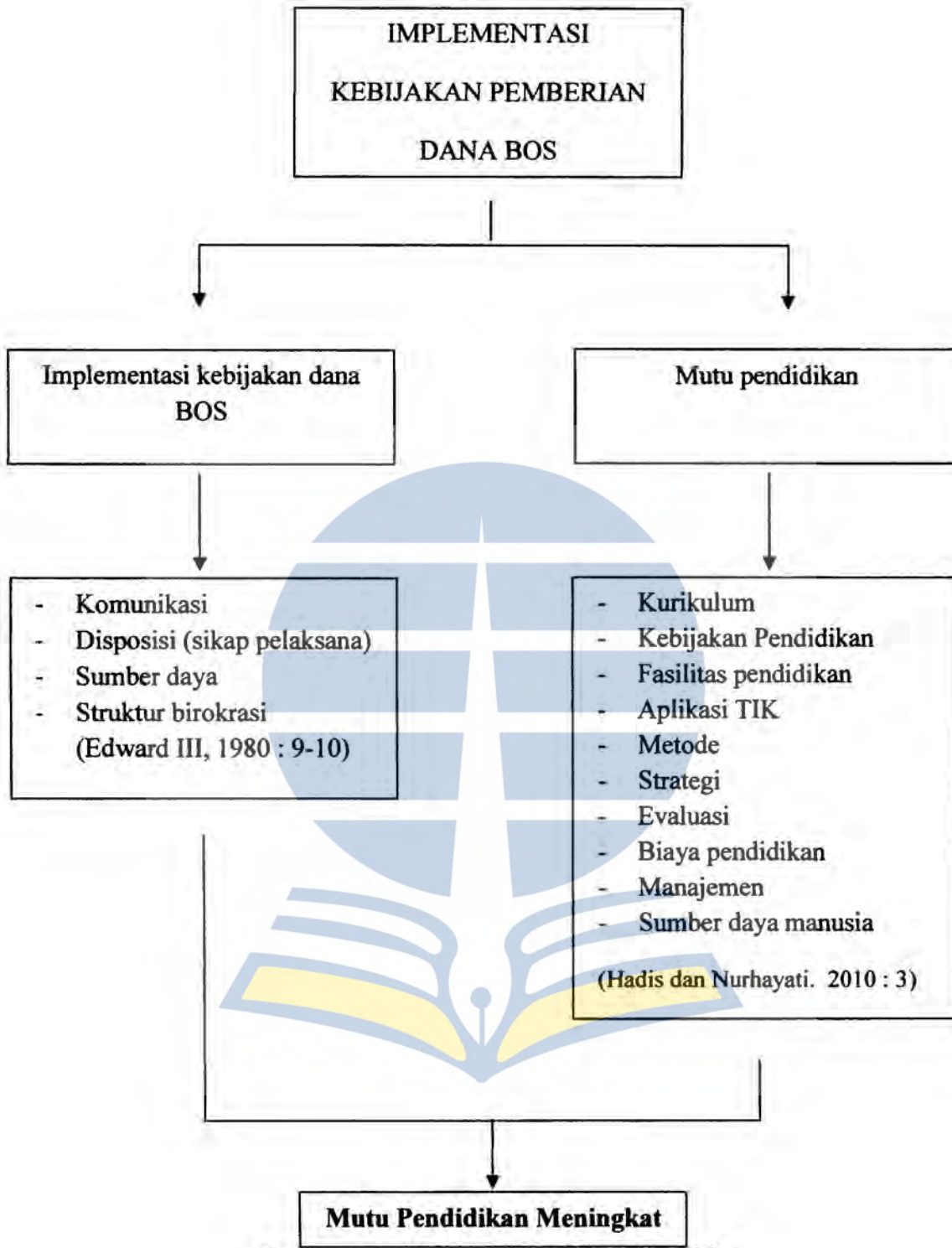
Konsep tersebut mempunyai arti bahwa terdapat hasil dari suatu kegiatan atau tindakan yang dikehendaki/keberhasilan mencapai sasaran, lebih lanjut tentang suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang dapat menghasilkan sesuai guna mencapai suatu tujuan organisasi atau dengan kata lain adalah suatu hasil kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya/kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.

Kemudian kebijakan pemerintah Kabupaten Buton Utara utamanya yang bersentuhan dengan sektor pendidikan seperti pembebasan biaya pendidikan hingga sekolah menengan pertama, alokasi anggaran untuk pendidikan yang cukup besar (20%) dari total APBD Kabupaten Buton Utara, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah dan ruang kelas untuk tempat belajar (RKB), dan pengembangan pendidikan luar sekolah. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Buton Utara, minimal dapat menanggulangi kesenjangan pendidikan antara wilayah di Buton Utara Atau dengan kata lain dapat berdampak positif bagi pengembangan pendidikan di Kabupaten Buton Utara.

Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional (Hadis dan Nurhayati, 2010:3).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat dibuatkan paradigma pemikiran peneliti seperti pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini akan memberikan berupa gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOS dalam Peningkatan Mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Alasan peneliti mengapa lokasi penelitian ini dilakukan pada sekolah dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara adalah: *pertama* penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara belum pernah dilakukan sebelumnya. *Kedua* peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Selain itu peneliti memiliki kedekatan dengan lokasi penelitian dan cenderung memberi kemudahan dalam proses penelitian, terutama untuk proses pengumpulan data lapangan. Selain itu juga peneliti dapat memperhemat waktu, tenaga dan biaya penelitian, jika penelitian ini dilakukan di daerah tersebut.

2. Waktu Penelitian

Dalam penyusunan hasil penelitian ini secara keseluruhan memerlukan waktu selama 3 bulan (bulan Maret s/d Mei 2014) mulai dari persiapan sampai

konsultasi. Penelitian ini dilaksanakan di empat sekolah dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu yaitu : SD Negeri 38 Kulisusu, SD Negeri 10 Kulisusu, SD Negeri 13 Kulisusu dan SD Negeri 12 Kulisusu. Yang mana penelitian ini mengambil dua sekolah dasar yang ada dipinggiran dan dua sekolah yang ada dalam Kecamatan Kulisusu.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Dalam penelitian ini pemecahan masalah yang teliti, dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara lapangan, dianalisis, penyajian dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah unsur yang terkait dan mengetahui persoalan dana BOS dan peningkatan mutu pendidikan pada tingkatan sekolah dasar. Dalam penelitian ini setiap sekolah peneliti akan mengambil 4 (empat) orang yang ditetapkan secara purposif sampel (mengetahui persoalan dana BOS dan peningkatan mutu pendidikan pada sekolah tersebut). Unsur-unsur informan yang diambil pada setiap sekolah adalah (1) kepala sekolah, (2) Bendahara, (3) guru dan (4) komite sekolah.

Agar data lebih valid maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data - data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan informan yang

lainnya antara kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran data dari informan utama seperti orang tua/wali siswa.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara mendalam (*In depth Interview*) atau disebut juga wawancara tak terstruktur, adapun data yang ingin diperoleh pada wawancara berupa informasi tentang kinerja pegawai negeri sipil dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, berupa bagaimana mereka meningkatkan mutu pendidikan, bagaimana upaya mereka untuk meningkatkan proses pembelajaran, pemahaman mereka tentang kerja, bagaimana dalam bekerja selalu taat terhadap tingkah laku yang telah ditentukan, bagaimana dalam bekerja selalu berupaya agar tercapai prinsip profesionalisme, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pada saat melakukan wawancara peneliti dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dan alat pencatat (buku dan pena). Semua informasi akan dicatat dengan teliti dan cermat, dan selalu dikonfirmasi ulang apabila masih ada yang kurang jelas.

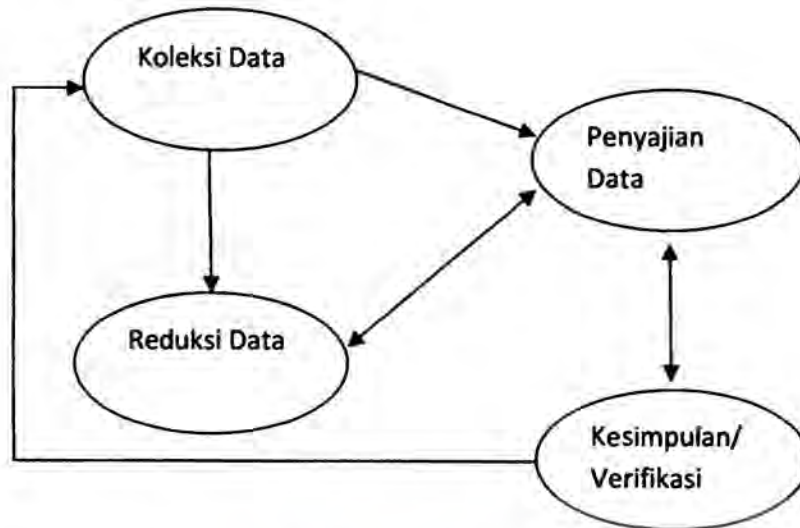
Agar penelitian dapat memberikan kefalitan terhadap suatu data yang diperoleh dari informan maka peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi ada 4 yaitu : (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, (4) triangulasi teori. Pada penelitian ini dari keempat triangulasi tersebut diatas, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempu langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses penyusunan data agar data dalam penelitian dapat ditafsirkan. Miles and Huberman (1992 :16) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data meliputi; Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data (*conclusion and drawing/verification*). Proses penelitian menurut model ini mengikuti alur siklus seperti pada gambar 3.1 berikut:



Bagan 3.1 Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman
Sumber : Prof. Dr. Sugiono, 2005

F. Keabsahan Data.

Teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini dengan kedudukan peneliti sebagai outsider adalah observasi partisipasi, metode ini peneliti diharapkan menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti, oleh sebab itu sangat penting bagi peneliti untuk membebaskan dirinya dari saringan kebudayaannya sendiri.

Sedangkan kedudukan peneliti sebagai insider, akan memudahkan peneliti dalam mengkategorisasikan dan menerjemahkan makna-makna dari pola perilaku dan informasi yang ada dari suatu masyarakat. Baik secara insider maupun outsider, peneliti haruslah dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga yang menjadi kegiatan akhir setelah pengumpulan dan analisis data adalah interopeksi, yaitu kegiatan menganalisis nilai-nilai dan prilakunya sendiri dan orang-orang yang berada dalam masyarakatnya sehingga semua perilaku yang teramati dan informasi yang didapatkan dari wawancara

dengan semua anggota masyarakat tutur konsisten dengan semua pemahaman yang mereka miliki.

Selain intropeksi sebagai tehnik penelitian untuk pemeriksaan keabsahan data, penelitian ini juga harus pula didukung oleh tehnik lain untuk lebih memperkuat ciri khasnya sebagai salah satu penelitian kualitatif yakni :

1. Ketekunan pengamatan yakni memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam.
2. Triangulasi yakni tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data tersebut. Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini untuk melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, yakni membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi atau dengan kata lain tehnik ini peneliti lakukan untuk mengecek kembali kepercayaan dan kebenaran setiap informasi yang diperoleh dari informan, pada saat proses penelitian berlangsung (data hasil wawancara dan pengamatan).
3. Diskusi dengan teman sejawat. Tehnik ini digunakan dengan cara menjelaskan hasil sementara dalam penelitian ini, dengan cara diskusi dengan teman sejawat, teman kuliah, atau teman-teman lain yang peneliti anggap banyak memahami tema dalam penelitian ini. Hasil kegiatan ini peneliti melakukan pemilahan data yang kurang cocok atau kurang serasi dengan

fokus dalam penelitian ini dipisahkan sehingga data-data yang dikumpulkan merupakan data yang benar-benar dapat mewakili dari fokus penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Lokasi Penelitian

a. Batas Wilayah

Kecamatan Kulisusu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kulisusu Utara
2. Sebelah Timur : Laut Banda
3. Sebelah Selatan : Laut banda
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kulisusu Barat

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kulisusu sebesar 172,78 km² dengan jumlah penduduk pada bulan Desember tahun 2013 sebanyak 22.968 jiwa yang terdiri dari 11.352 jiwa laki-laki dan 11.616 Jiwa perempuan. Kantor Kecamatan Kulisusu memiliki jumlah pegawai sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut : 2 orang gol. IV, 4 orang golongan III dan 1 orang golongan II, serta dibantu 9 orang honorer K2. Kecamatan kulisusu merupakan kecamatan yang mempunyai penduduk terpadat dari enam kecamatan jika kita bandingkan dengan kelima (5) kecamatan yang lainnya yang ada dikabupaten Buton Utara. Kecamatan Kullisusu juga mempunyai kelurahan dan desa yang ssedikit lebih banyak dari kecamatan lain yang mempunyai cakupan wilayah sebanyak 7 Kelurahan dan 16 desa dengan luas wilayah untuk masing-masing desa/kelurahan dapat disajikan seperti pada tabel 4.1 berikut :

Tabel . 4.1. Luas Wilayah dan Persentase Tiap Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
a.	Kelurahan		
1.	Bone Lipu	5,61	2,98
2.	Lemo	1,89	1,10
3.	Lakonea	1,90	1,10
4.	Lipu	1,74	1,01
5.	Bangkudu	4,62	2,67
6.	Sara'Ea	1,12	0,65
7.	Wandaka	1,13	0,65
b.	Desa		
8.	Lantagi	4,56	2,43
9.	Malalanda	3,52	1,87
10.	Lemo'Ea	1,49	0,86
11.	Rombo	8,44	4,88
12.	Linsowu	6,75	3,91
13.	Banu-Banua Jaya	1,12	0,65
No.	Desa/Kelurahan	Luas (km²)	Persentase (%)
14.	Wasalabose	1,86	1,07
15.	Kadacua	4,11	2,38
16.	Loji	1,97	1,14
17.	Laangke	1,28	0,74
18.	Kalibu	4,43	2,46
19.	Eelahaji	30,50	17,65
20.	Jampaka	7,29	4,22
21.	Tomoahi	13,27	7,68
22.	Wacu La'ea	40,43	23,40
23.	Tri Waci-Wacu	23,75	13,75
JUMLAH		172,78	100,00

Sumber : Kecamatan Kulisusu 2014

Jumlah Desa/ Kelurahan yang ada di kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang memiliki luas 172,78 km² dengan jumlah penduduk pada bulan Desember tahun 2013 sebanyak 22.968 jiwa yang memiliki cakupan wilayah sebanyak 7 Kelurahan dan 16 desa dapat dilihat pada Peta Administarasi Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara seperti pada gambar 4.1 sebagai berikut :



Sumber : Kecamatan Kulisusu 2014

c. Keadaan Geografi

Kecamatan Kulisusu merupakan salah satu kecamatan dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Utara dan Ereke sebagai ibukota Kecamatan Kulisusu. Wilayah Kecamatan Kulisusu menempati pesisir pantai dan permukaan wilayahnya pada umumnya merupakan dataran rendah sampai berbukit dengan tingkat kemiringan tanahnya juga berada pada klasifikasi sedang.

d. Prasarana Jalan

Kondisi prasarana jalan yang menghubungkan antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten (Buranga) sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara kondisi prasarana jalan yang

menghubungkan antara desa di Kecamatan Kulisusu hampir diseluruh desa kondisi jalannya sudah baik dan beraspal sehingga memudahkan mobilitas penduduk untuk mengadakan hubungan perekonomian maupun kegiatan sosial lainnya. Dari 23 desa/kelurahan yang ada, tinggal 2 desa kondisi jalannya masih rusak berupa batu pengerasan yaitu Desa Wacu La'Ea dan Desa Triwcu-wacu.

e. Iklim

Kecamatan Kulisusu pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata $25^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$, seperti halnya di wilayah lain pada bulan November sampai Juni angin bertiup dari Benua Asia dan Samudera Pasifik mengandung banyak uap air yang menyebabkan terjadinya hujan.

f. Pemerintahan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang di mekarkan dari Kabupaten Muna dengan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buton Utara meliputi 6 Kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Kulisusu.

g. Jumlah Penduduk

Tujuan Pembangunan Nasional pada hakekatnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan seluruh penduduk ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, selaras dan serasi dengan lingkungan.

Sasaran pokok pembangunan adalah pendudu dimana penduduk itu sendiri dapat merupakan subjek yang sekaligus obyek dalam pembangunan. Dalam

memasuki era pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini diarahkan kepada pembangunan wilayah Indonesia bagian timur dan salah satu wilayahnya adalah Kecamatan Kulisusu yang merupakan bagian dari Kabupaten Buton Utara.

Pada bulan Desember tahun 2013 penduduk Kecamatan Kulisusu mencapai 22.968 jiwa dari 11.352 laki-laki dan 11.616 jiwa perempuan. Adapun jumlah penduduk menurut desa/kelurahan dapat disajikan seperti tabel 4.2 :

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kulisusus

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk
a.	Kelurahan		
1.	Bone Lipu	5,61	1.373
2.	Lemo	1,89	876
3.	Lakonea	1,90	750
4.	Lipu	1,74	2.784
5.	Bangkudu	4,62	2.184
6.	Sara'Ea	1,12	1.240
7.	Wandaka	1,13	2.012
b.	Desa		
8.	Lantagi	4,56	578
9.	Malalanda	3,52	566
No.	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk
10.	Lemo'Ea	1,49	702
11.	Rombo	8,44	970
12.	Linsowu	6,75	912
13.	Banu-Banua Jaya	1,12	940
14.	Wasalabose	1,86	685
15.	Kadacua	4,11	585
16.	Loji	1,97	1.014
17.	Laangke	1,28	763
18.	Kalibu	4,43	802
19.	Eelahaji	30,50	824
20.	Jampaka	7,29	543
21.	Tomoahi	13,27	920
22.	Wacu La'ea	40,43	471
23.	Tri Waci-Wacu	23,75	474
JUMLAH		172,78	22.968

Sumber : Kecamatan Kulisusu, 2014

h. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian penduduk pada umumnya pertanian dalam arti luas yang meliputi petani dibidang pangan, perkebunan, pengelolaan dan budidaya hasil laut. Sedangkan yang lainnya terdiri dari pedagang, pegawai negeri, maupun TNI/POLRI termasuk pegawai swasta, buruh harian dan sisanya tidak memiliki mata pencaharian yang jelas.

2. Jumlah SD di Kecamatan Kulisusu

Kondisi dan jumlah SD Negeri yang ada dikecamatan kulisusu adalah sebanyak 22 sekolah dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu

No.	Nama Sekolah	Jumlah Guru	Keterangan
1	SDN 1 Kulisusu	17	PNSD
2	SDN 5 Kulisusu	14	PNSD
3	SDN 6 Kulisusu	15	PNSD
4	SDN 7 Kulisusu	9	PNSD
5	SDN 10 Kulisusu	15	PNSD
6	SDN 11 Kulisusu	9	PNSD
7	SDN 12 Kulisusu	9	PNSD
8	SDN 13 Kulisusu	9	PNSD
9	SDN 15 Kulisusu	14	PNSD
10	SDN 16 Kulisusu	11	PNSD
11	SDN 17 Kulisusu	10	PNSD
12	SDN 18 Kulisusu	9	PNSD
13	SDN 19 Kulisusu	10	PNSD
14	SDN 23 Kulisusu	12	PNSD
15	SDN 24 Kulisusu	10	PNSD
16	SDN 27 Kulisusu	13	PNSD
17	SDN 28 Kulisusu	9	PNSD
18	SDN 29 Kulisusu	9	PNSD
19	SDN 30 Kulisusu	5	PNSD
20	SDN 36 Kulisusu	10	PNSD
21	SDN 38 Kulisusu	9	PNSD
22	SDN 39 Kulisusu	7	PNSD
	Jumlah	235	

Sumber : UPTD Kecamatan Kulisusu 2014.

3. Jumlah Guru SD Negeri di Kecamatan Kulisusu

Tabel 4.4. Jumlah Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu

No.	Nama Sekolah	2009	2010	2011	2012	2013
1	SDN 1 Kulisusu	15	15	12	12	17
2	SDN 5 Kulisusu	9	10	12	12	14
3	SDN 6 Kulisusu	9	13	13	13	15
4	SDN 7 Kulisusu	6	8	7	9	9
5	SDN 10 Kulisusu	15	15	14	14	15
6	SDN 11 Kulisusu	8	10	10	10	9
7	SDN 12 Kulisusu	10	14	13	10	9
8	SDN 13 Kulisusu	9	11	10	10	9
9	SDN 15 Kulisusu	13	13	13	15	14
10	SDN 16 Kulisusu	10	11	11	12	11
11	SDN 17 Kulisusu	9	9	11	12	10
12	SDN 18 Kulisusu	11	11	10	10	9
13	SDN 19 Kulisusu	12	12	13	11	10
14	SDN 23 Kulisusu	7	8	10	12	12
15	SDN 24 Kulisusu	8	9	9	11	10
16	SDN 27 Kulisusu	7	8	13	14	13
17	SDN 28 Kulisusu	12	12	10	10	9
18	SDN 29 Kulisusu	5	7	9	10	9
19	SDN 30 Kulisusu	5	7	4	6	5
20	SDN 36 Kulisusu	9	9	9	9	10
21	SDN 38 Kulisusu	7	8	8	8	9
22	SDN 39 Kulisusu	5	6	6	6	7
	Jumlah	201	226	227	236	235

Sumber : UPTD Kecamatan Kulisusu 2014.

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah guru yang tersebar diseluruh Sekolah Dasar Negeri dikecamatan kulisusu sudah dapat terorganisir walaupun terkadang dalam satu sekolah ada yang kelebihan dan juga ada yang kurang, ini dikarenakan oleh beberapa pertimbangan penempatan salah satunya adalah faktor keluarga.

4. Jumlah Siswa SD Negeri di Kecamatan Kulisusu

Tabel 4.5. Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu

No.	Nama Sekolah	2009	2010	2011	2012	2013
1	SDN 1 Kulisusu	197	202	224	230	236
2	SDN 5 Kulisusu	223	243	331	268	273
3	SDN 6 Kulisusu	154	279	289	314	320
4	SDN 7 Kulisusu	77	79	80	84	87
5	SDN 10 Kulisusu	221	220	251	270	274
6	SDN 11 Kulisusu	124	129	131	120	128
7	SDN 12 Kulisusu	156	159	184	183	163
8	SDN 13 Kulisusu	128	134	143	143	140
9	SDN 15 Kulisusu	252	260	276	280	285
10	SDN 16 Kulisusu	165	169	127	144	148
11	SDN 17 Kulisusu	117	125	142	135	141
12	SDN 18 Kulisusu	140	142	141	135	141
13	SDN 19 Kulisusu	173	178	175	180	186
14	SDN 23 Kulisusu	237	229	227	220	225
15	SDN 24 Kulisusu	99	102	102	102	122
16	SDN 27 Kulisusu	141	130	131	130	138
17	SDN 28 Kulisusu	109	107	107	90	95
18	SDN 29 Kulisusu	89	80	82	79	82
19	SDN 30 Kulisusu	65	84	84	138	72
20	SDN 36 Kulisusu	142	143	143	138	143
21	SDN 38 Kulisusu	115	113	105	105	114
22	SDN 39 Kulisusu	92	65	68	66	72
	Jumlah	3216	3372	3543	3554	3576

Sumber : UPTD Kecamatan Kulisusu 2014.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dengan adanya Dana bantuan operasional sekolah keinginan anak untuk menempuh pendidikan khususnya pada tingkatan disekolah dasar mempunyai kemauan yang tinggi, karena beban orang tua berkurang karena boleh dikatakan sangat membantu karena dengan masuknya dana BOS menghapuskan segala pungutan pada siswa.

5. Jumlah Dana BOS yang Diterima setiap SD di Kecamatan Kulisusu 5 Tahun Terakhir (2009 – 2013)

Tabel 4.6. Jumlah dana BOS Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu 5 tahun terakhir.

NO	NAMA SEKOLAH	2009	2010	2011	2012	2013
		JML (Rp)	JML (Rp)	JML (Rp)	JML (Rp)	JML (Rp)
1	SDN 1 KULISUSU	78.209.000	80.19.4000	88.928.000	133.400.000	136.880.000
2	SDN 5 KULISUSU	88.531.000	96.471.000	131.407.000	155.440.000	158.340.000
3	SDN 6 KULISUSU	61.138.000	110.763.000	114.733.000	182.120.000	185.600.000
4	SDN 7 KULISUSU	30.569.000	31.363.000	31.760.000	48.720.000	50.460.000
5	SDN 10 KULISUSU	87.737.000	87.340.000	99.647.000	156.600.000	158.920.000
6	SDN 11 KULISUSU	49.228.000	51.213.000	52.007.000	69.600.000	74.240.000
7	SDN 12 KULISUSU	61.932.000	63.123.000	73.048.000	106.140.000	94.540.000
8	SDN 13 KULISUSU	50.816.000	53.198.000	56.771.000	82.940.000	81.200.000
9	SDN 15 KULISUSU	100.044.000	103.220.000	109.572.000	162.400.000	165.300.000
10	SDN 16 KULISUSU	65.505.000	67.093.000	50.419.000	83.520.000	85.840.000
11	SDN 17 KULISUSU	46.449.000	49.625.000	56.374.000	78.300.000	81.780.000
12	SDN 18 KULISUSU	55.580.000	56.374.000	55.977.000	78.300.000	81.780.000
13	SDN 19 KULISUSU	68.681.000	70.666.000	69.475.000	104.400.000	107.880.000
14	SDN 23 KULISUSU	94.089.000	90.913.000	90.119.000	127.600.000	130.500.000
15	SDN 24 KULISUSU	39.303.000	40.494.000	40.494.000	59.160.000	70.760.000
16	SDN 27 KULISUSU	55.977.000	51.610.000	52.007.000	75.400.000	80.040.000
17	SDN 28 KULISUSU	43.273.000	42.479.000	42.479.000	52.200.000	55.100.000
18	SDN 29 KULISUSU	35.333.000	31.760.000	32.554.000	45.820.000	47.560.000
19	SDN 30 KULISUSU	25.805.000	33.348.000	33.348.000	80.040.000	41.760.000
20	SDN 36 KULISUSU	56.374.000	56.771.000	56.771.000	80.040.000	82.940.000
21	SDN 38 KULISUSU	45.655.000	44.861.000	41.685.000	60.900.000	66.120.000
22	SDN 39 KULISUSU	36.524.000	25.805.000	26.996.000	38.280.000	41.760.000
	JUMLAH	1.276.752.000	1.338.684.000	1.406.571.000	2.061.320.000	2.079.300.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara 2014.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas tentang jumlah dana BOS Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu terjadi peningkatan dari setiap tahunnya apabila terjadi juga peningkatan siswa yang masuk pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Untuk penerimaan tahun 2009 – 2011 jumlah perkepala untuk siswa sekolah dasar yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Rp. 390.000/siswa/tahun. Sedangkan untuk tahun 2012-2013 penerimaan dana BOS adalah Rp. 580.000/siswa/tahun.

B. Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah, maka sekolahlah merupakan lembaga formal tempat siswa mengembangkan kemampuan dirinya. Disinilah peran sekolah dalam memaksimalkan setiap kemampuan siswa sehingga menghasilkan prestasi yang cemerlang. Berbicara mengenai prestasi sangatlah luas, pihak pengelola pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai sumber daya yang berkualitas sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional, maka seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, siswa, sarana sekolah, fasilitas sekolah menjadi sangat strategis dalam pencapaian prestasi belajar.

Dengan masuknya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan mutu pendidikan disekolah dasar negeri dikecamatan kulisusu, melalui dana tersebut tidak ada alasan pihak sekolah untuk kekurangan lagi sarana pendidikan, kurikulum, strategi, metode, bahkan guru yang berpengalaman atau profesional karena dana BOS tersebut dapat dipakai untuk kebutuhan peserta

didik dan pelatihan pengembangan profesi guru melalui MGMP, dan MKKS bagi kepala sekolah.

Implementasi dana BOS dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar di Kecamatan Kulisusu karena terlihat berdasarkan hasil ujian nasional selalu lulus 100% dan nilainya ada peningkatan pada rata-rata hasil ujian nasional lima tahun terakhir. Melalui dana BOS fasilitas pendidikan selalu menjadi prioritas karena ada dalam juknis dana BOS dan layanan pendidikan di sekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu menjadi optimal, rasio buku menjadi 1 orang satu untuk kebutuhan peserta didik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah dasar negeri di Kecamatan ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah masuknya dana BOS, dengan masuknya dana BOS tersebut sekolah menjadi baik dari segi sarana prasarana, mutu pendidikan meningkat dibuktikan dengan lulusnya 100% peserta ujian pada sekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu.

Peningkatan mutu pendidikan seperti yang disampaikan oleh :

Hadis dan Nurhayati (2010: 3) mengatakan bahwa :

“Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional”.

Pandangan lain tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan seperti yang diuraikan oleh :

Sagala (2007: 99) mengatakan bahwa :

“Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik kearah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak hanya menguasai bahan ajar dan memiliki kemampuan teknis edukatif tetapi memiliki juga kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, keluarga maupun masyarakat”.

Pihak sekolah dan orang tua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tenang dan kondusif dengan dukungan yang diberikan pemerintah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dapat mengoptimalkan semangat dan minat anak-anak, yang pada akhirnya akan mampu berprestasi dengan baik dengan meningkatkan prestasi belajarnya menuju mutu pendidikan yang diharapkan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian dana BOS di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu belum di laksanakan dengan optimal. Perumusan dan penyusunan tentang operasionalisasi kebijakan yang harus ditempuh dan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan penyebar luasannya belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Peningkatan mutu pendidikan yang di maksudkan dalam penelitian ini dilihat dari keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu. Proses pencapaian tujuan dan sasaran tersebut mencakup lingkup organisasi, untuk menyelenggarakan tugas secara efisien dan efektif.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Manajer BOS Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Kulisusu mengatakan bahwa:

Dalam sosialisasi program Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu kami dari pihak Dinas Pendidikan melibatkan langsung para kepala sekolah terhadap sosialisasi tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam sosialisasi tersebut agar para peserta mengetahui secara pasti tentang asal usul penggunaan dana BOS dan mempertanyakan apa yang menjadi kendala pada proses pendataan siswa untuk peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut dan juga agar sekolah memperhatikan alur dan proses pendataan dan verifikasi data, (wawancara 24 April 2014).

Ini sejalan dengan teori Edwar III (1980: 9-10) mengatakan bahwa : Dalam pemberian kebijakan ada empat syarat yang harus dipenuhi antara lain : (1) komunikasi, (2) disposisi atau sikap pelaksana, (3) sumber daya, dan (4) struktur birokrasi.

Dalam setiap kebijakan publik standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program, agar implementasinya dapat berjalan sesuai rencana. Dikemukakannya bahwa komunikasi memegang peranan penting, karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada aparat, dengan tepat dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengindikasikan bahwa kebijakan pemberian dana BOS di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu belum dilaksanakan dengan optimal. Perumusan dan penyusunan tentang operasionalisasi kebijakan yang harus ditempuh dan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan penyebar luasannya belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Peningkatan mutu pendidikan yang di maksudkan dalam penelitian ini dilihat dari keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu. Proses pencapaian tujuan dan sasaran tersebut mencakup lingkup organisasi, untuk menyelenggarakan tugas secara efisien dan efektif.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Manajer BOS Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Kulisusu mengatakan bahwa:

Dalam sosialisasi program Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu kami dari pihak Dinas Pendidikan melibatkan langsung para kepala sekolah terhadap sosialisasi tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam sosialisasi tersebut agar para peserta mengetahui secara pasti tentang asal usul penggunaan dana BOS dan mempertanyakan apa yang menjadi kendala pada proses pendataan siswa untuk peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut dan juga agar sekolah memperhatikan alur dan proses pendataan dan verifikasi data, (wawancara bulan April 2014).

C. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan implementasi kebijakan pemberian dana BOS di SD Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara di uraikan sesuai tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pentingnya pengelolah dalam hal mengelolah dana BOS yang mana sesuai dengan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan yang sangat membantu dan menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) adalah perencanaan pengelolaan pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal, perencanaan ini merupakan system perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan pengelolaan pendidikan tergantung pada jenis program pelayanan dan tujuan yang ditetapkan.

Program pendidikan yang berorientasi pada Delapan (8) standar nasional pendidikan dan salah satunya adalah standar pengelolaan. Pemenuhan kebutuhan pengelolah akan berbeda dengan program pendidikan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar, dalam hal pengelolaan, karena itu dalam perencanaan kebutuhan tersebut dikaji system internal pendidikan dan aspek eksternalnya seperti masalah demographi, ekonomi kebijakan-kebijakan yang ada. Kegagalan dalam tahap pengelolaan ini akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan karena pengelolah merupakan ujung tombak Bergeraknya seluruh aspek pendidikan maka akan terjadi sebuah keterpurukan pengelolaan yang tidak efektif dan tidak efisien dalam implementasinya.

Perencanaan opsional dalam menyusun rencana peningkatan pengelolaan pendidikan setelah target pengelolah pendidikan ditetapkan, maka lembaga pendidikan harus menyusun rencana peningkatan mutu mutu pendidikan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang: aspek-aspek perencanaan pendidikan yang ingin dicapai,

kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan, dan dimana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan lembaga dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah dan orang tua peserta didik baik secara moral maupun fisik untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan tersebut.

Yang perlu di perhatikan oleh pendidikan di Kecamatan Kulisusu dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan pengelola kepada semua pihak yang menjadi *Stakeholder* pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya, dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, barapa kemampuan pendidikan dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus di tanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan pengelolaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta didik dalam program ini bisa dihindari.

Setelah target Pengelolah dalam hal pengelolan pendidikan ditetapkan maka pihak pendidikan harus menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek mutu sarana prasarana pendidikan yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus di tempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan serta berapa biaya yang diperlukan untuk sarana prasarana pendidikan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pendidikan di Kabupaten Buton Utara dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah dan orang tua peserta didik baik secara moral maupun fisik untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu sarana

prasarana pendidikan tersebut. Namun dalam pelaksanaan perencanaan ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang kurang mendukung dari pada pelaksanaan program tersebut.

2. Manajemen (pengelolaan) Dana BOS

Manajemen atau pengelolaan dana BOS merupakan faktor utama dalam hal keberhasilan pendidikan di Kecamatan Kulisusu yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi Stakeholder pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta didik program ini bisa di hindari. Dalam melengkapi sarana tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal karena system manajemen pengelolaan belum secara optimal dilakukan ketebukan dalam hal pendanaan yang belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan.

Dari standar nasional pendidikan yang tersedia faktor penghambat tidak terlalu berarti, tinggal bagaimana komitmen dan kemampuan manajerial pada setiap stakeholder, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah SD di kecamatan Kulisusu mengemukakan bahwa:

Penghambat sebetulnya tidak terlalu bermasalah, hanya yang jadi penghambat itu adalah ketidak updatean atau update informasi dari tenaga edukasi, tenaga-tenaga kependidikan lainnya itu bagian dari penghambat kecil, tapi kalau itu manajemen mempersiapkannya, dan mempersiapkan saran komunikasi, jaringan internet itu bagian dari pendukung, tapi kalau tidak, itu bagian dari penghambat (wawancara 26 April 2014).

Pemeliharaan manajemen pengelolaan yang baik akan berpengaruh terhadap proses pendidikan karena manajemen pendidikan merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar.

Salah satu fungsi manajemen (pengelolaan) sumber daya manusia adalah *training and development* artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga yang profesional yang bersumber daya manusia yang baik dan tepat sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga atau karyawan untuk menghadapi tugas pekerjaan jabatan yang dianggap belum menguasainya. *Management thought* yang dikemukakan Taylor, bahwa tenaga kerja membutuhkan latihan kerja yang tepat. Teori ini sangat tepat untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam kemampuan dan tanggung jawab bekerja, sehingga dalam menyelesaikan tugas jabatan lebih efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam instansi pemerintah biasanya para tenaga kerja yang akan menduduki jabatan baru yang tidak didukung dengan pendidikannya atau belum mampu melaksanakan tugasnya, biasanya upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan karir. Dengan melalui pelatihan dan pengembangan, tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, mengembangkan pekerjaannya. Dalam kaitannya dengan tema ini, pemakalah mencoba dengan menyajikan poin penting yang ada kaitannya dengan pelatihan dan pengembangan.

3. Birokrasi Pencairan Dana BOS

Pelaksana pendidikan memerlukan kompetensi Birokrasi yang dapat mendukung terlaksananya program pendidikan khususnya untuk pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga mampu mengelola dan

memanfaatkan setiap sarana pendukung yang tidak mampu menyamai perlengkapan yang diberikan dan ini dapat berakibat pada proses pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sesuai hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Kulisusu mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara telah berjalan dan dilaksanakan sebagaimana adanya, namun ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan di kecamatan kulisusu karena sumber daya yang melaksanakan pendidikan sangat terbatas latar belakang yang sesuai dengan pendidikan tersebut. (wawancara, 28 April 2014).

Adapun pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dasar negeri kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara selalu terlambat sehingga pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak tentang program sekolah.

Berdasarkan data yang ada yang menjadi penghambat utama dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan BOS di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara setiap tahunnya, relative sama karena jumlah siswa yang ada juga relative sama dari 3 (tiga) tahun terakhir.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Kulisusu mengemukakan bahwa:

Dari segi prestasi akademik saya tidak terlalu sanksi sebenarnya, walaupun semua fasilitas dan sarana yang ada disini sudah kurang memenuhi standar pendidikan. Hal tersebut perlu pembenahan, menambahkan apa yang rusak, kan begitu. Yang menyangkut persoalan prestasi ekstrakurikuler, ini yang perlu didorong terus, apakah itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, ini perlu di dorong terus supaya dia berkesinambungan. Bukan hanya prestasi akademik tapi dia juga berprestasi dari segi yang lainnya. (wawancara April 2014).

Sehingga kalau ditinjau lebih jauh perhatian masyarakat terhadap eksistensi pendidikan Kecamatan Kulisusu masih bersifat “elit” terbatas pada kalangan tertentu saja. Benar bahwa dalam sejarahnya pendidikan di Buton Utara

merupakan lembaga pendidikan yang dibangun dan dikelola atas inisiatif masyarakat, tetapi kepemilikannya masih bersifat eksklusif. Meskipun mengakar kuat, pendidikan di Buton utara masih merefleksikan kerja individual ketimbang kolektif. Hal ini mengakibatkan *sense of ownership* masyarakat terhadap pendidikan rendah.

Kondisi tersebut perlu dijadikan bahan pemikiran oleh pihak *stake holders*, yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan, di Buton Utara untuk mengembangkan suatu system perbaikan pendidikan yang berkelanjutan (*continous quality improvement*) sampai sekarang. Nampak bahwa perbaikan yang dilakukan itu parsial, tidak ada kesinambungan, dan hanya bersifat tambal sulam.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa teori yang dipergunakan untuk mendukung implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang di kemukakan oleh Edward III (1980 : 9-10) yang terdiri dari (1) komunikasi, (2) Disposisi,(3) kualitas sumber daya manusia, (4) struktur birokrasi. Kemudian dalam proses implementasi kebijakan bukan saja aspek pengetahuan yang dikembangkan tetapi juga aspek keterampilan dan aspek sikap, sehingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan sumber daya manusia, semuanya mendukung dari penelitian tersebut.

Sejumlah faktor menjadi penyebab keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendiknas. Pertama adalah payung hukum yang mengatur mekanisme penyaluran itu masih berupa Surat Edaran

Bersama (SEB) antara Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri. Lemahnya sumber daya manusia dan administrasi sekolah juga menjadi hambatan. Sebab, mekanisme baru ini menuntut sekolah negeri mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pemakaian dana BOS, tetapi tidak semua sekolah terutama sekolah dasar di daerah terpencil mempunyai petugas dan kemampuan administratif untuk menyusun RKA. Di banyak daerah, penerapan ketentuan ini juga beragam karena ada daerah yang bahkan menuntut sekolah menyusun RKA secara detail, sebelum memberikan dana BOS. Padahal SKB Mendiknas dan Mendagri tidak menyaratkan RKA secara detail. Alasan keterlambatan penyaluran dana BOS lainnya yakni di beberapa daerah, DPRD terlambat menyetujui APBD. Padahal, SKB tidak menggolongkan dana BOS sebagai bagian dari APBD yang memerlukan persetujuan DPRD. “Ada pula masalah hukum yang tengah dihadapi kuasa pengguna anggaran di daerah yang turut memperlambat penyaluran dana BOS.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang

telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan

Penyebab timbulnya masalah-masalah dalam program BOS yaitu:

1. Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Hendaknya pengalokasian dana didasarkan pada kebutuhan sekolah, agar tidak terjadi saling tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan. Adakalanya sekolah yang kebutuhannya sedikit, dan ada sekolah yang kebutuhannya banyak. Jika anggaran semua sekolah sama, di sekolah yang kebutuhannya sedikit akan memancing timbulnya korupsi karena anggaran yang berlebih, sedangkan di sekolah yang kebutuhannya banyak akan tetap mengalami kekurangan karena kebutuhannya tidak terpenuhi.
2. Alokasi dana BOS 'dipukul rata' untuk semua sekolah di semua daerah, pada tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah berbeda
3. Korupsi dana pada tingkat pusat (Kemendiknas) terutama berkaitan dengan dana safe guarding.
4. Dinas pendidikan meminta sodokan atau memaksa sekolah untuk membuat pengadaan barang kepada perusahaan tertentu yang sudah ditunjuk dinas.
5. Kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi melalui penggelapan, mark up, atau mark down.
6. Uang yang dikeluarkan oleh orang tua murid cenderung bertambah mahal walaupun sudah ada dana BOS.

Penyebab timbulnya masalah dana Bantuan Operasional Sekolah bahwa didalam implementasinya fungsi pengawasan sangat kurang, tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara seperti Kemendiknas, dinas pendidikan, maupun sekolah. Pada tingkat pusat proses penganggaran pun turut dimonopoli oleh Kemendiknas, akibatnya kepentingan Kemendiknaslah yang lebih terpenuhi bukan mendahulukan yang perlu. Penyebab yang lain misalnya pada tingkat penyelenggara (Sekolah dan perguruan tinggi) tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran warga dan stakeholder tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Lembaga pengawasan internal seperti Itjen, Bawasda dan Bawasko tidak mampu menjalankan fungsi. Serta pada tingkat sekolah semua kebijakan baik akademis maupun finansial direncanakan dan dikelola kepala sekolah dan komite sekolah dibajak oleh kepala sekolah sehingga menjadi perpanjangan tangan kepala sekolah.

Kami berpendapat cara penyelewengan dana BOS yang paling bisa terjadi adalah melalui setoran awal kepada dinas sebelum dana BOS dicairkan atau didalam sekolah itu sendiri berhubung sekolah tidak melakukan kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah. Selain itu, penyusunan APBS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. Akhirnya, kebocoran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari. Serta dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dana BOS yang kurang atau bahkan tidak dapat

diakses oleh publik apabila ada kebutuhan informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS.

D. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pemberian Dana BOS.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan pemberian dana BOS tersebut adalah :

1. Upaya jangka pendek.

Walaupun terdapat beberapa masalah dan kendala tetap masih ada upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara dan pihak sekolah yaitu antara lain untuk kebutuhan yang mendesak pihak sekolah mencari bantuan dana dari pihak komite sekolah atau pihak lain untuk kebutuhan mendesak tersebut.

2. Upaya Jangka Panjang.

Pihak dinas pendidikan kabupaten dalam hal ini melalui manajer Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) memberikan ketegasan agar pelaporan dana BOS lebih cepat karena agar supaya proses pencairannya juga lebih cepat, sehingga apa yang menjadi kendala-kendala dilapangan bisa teratasi dengan sebaik-baiknya.

Adapun solusi lain yang dapat saya ketengahkan pada Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS memang sudah banyak disinyalir di beberapa tempat, namun tentunya juga hal ini tidak bisa digeneralisasikan di semua tempat dan kondisi penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi, namun jika dilihat dari segi peluang atau kesempatan, banyak sekali peluang yang bisa digunakan oleh oknum untuk bisa melakukan penyelewengan. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak

bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Dana BOS Program dana BOS memberikan bantuan dana untuk kegiatan operasional sekolah dalam jumlah yang cukup besar, khususnya keringanan biaya sumbangan bagi siswa miskin. Oleh karenanya, program ini telah mengubah struktur pendanaan sekolah secara signifikan. Di satu sisi, besarnya dana yang diterima sangat membantu meringankan beban orang tua dan instansi pendidikan dalam pembiayaan sekolah. Dengan demikian diharapkan akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kapasitas Sekolah dasar Negeri yang ada dikecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Adanya peran komite sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana BOS di sekolah terdiri dari kepala sekolah selaku penanggung jawab anggota yaitu wakil kepala sekolah, bendahara, satu orang tenaga pendidik dan komite sekolah. Di mana kepala sekolah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggung jawab untuk mengelola dana BOS di tingkat sekolah. Sementara Komite Sekolah memantau penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah. Komite sekolah merupakan mitra sekolah yang berkedudukan dan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Kepmendiknas Nomor 044/U/202 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur masyarakat seperti dewan guru, tokoh masyarakat, dan orang tua/wali murid, dan pembentukannya harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat

dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah.

Menghapuskan kebijakan pendidikan yang bersubsidi jelas bukan menjadi solusi, karena memang pada intinya pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi, dan juga Undang-Undang kita telah mengamanatkan untuk memberikan layanan gratis untuk pendidikan dasar. Oleh karena itu, penghapusan sama sekali kebijakan BOS bukan merupakan solusi bagi kemelut pengelolaan dana BOS.

Ada beberapa langkah yang kemungkinan bisa diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini diantaranya :

1. Peninjauan Kembali Kebijakan

UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua warga, terlebih pendidikan dasar untuk wajib belajar Sembilan tahun menjadi hak utama bagi warga Negara dan Negara wajib mengusahakan pembiayaannya. Ini menjadi amanat besar dan latar belakang utama kenapa dana BOS hadir dalam proses pendidikan wajib belajar 9 tahun. Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah dan tidak semua warga Negara membutuhkan dan harus diberi subsidi untuk pendidikan dasar ini, hal ini terbukti dengan beberapa sekolah yang tidak menerima dana BOS, tapi tetap menjual kualitas kepada customernya.

Peninjauan kembali bukan berarti penghapusan program, tapi pembaharuan design program BOS bisa menjadi solusi. Bisa saja pemerintah mengatur kembali pendanaan untuk sekolah yang sudah maju secara financial dan juga aturan yang khusus untuk warga Negara yang sudah tidak layak untuk mendapatkan subsidi.

2. Dana Berkeadilan

Adil bukan berarti sama rata bisa saja besaran antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, tapi secara teknis dan hakikatnya besaran itu bisa mencukupi serta bisa digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu dana yang berkeadilan sudah saatnya diberlakukan untuk pengelolaan subsidi pendidikan. Tidak sepatasnya peserta didik yang orang tuanya mampu secara financial, tapi masuk dan bersekolah di sekolah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga disini dibutuhkan peran serta dari sekolah untuk benar-benar mendata peserta didik yang layak disubsidi.

Jika dana berkeadilan ini benar-benar diterapkan dalam system pengelolaan dana subsidi pendidikan, bisa saja kedepan orang tua akan beranggapan jika dia tergolong kedalam warga yang layak mendapatkan subsidi maka dia harus menyekolahkan anaknya pada sekolah bersubsidi, sedangkan untuk warga yang tidak masuk kedalam kategori layak subsidi menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tidak bersubsidi. Sehingga konsentrasi dana akan benar-benar terarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan tidak ada kesenjangan kualitas antara sekolah yang bersubsidi dengan sekolah yang tidak bersubsidi. Namun tentunya dana berkeadilan ini dibutuhkan sifat manusia Indonesia yang baik tidak mendahulukan ego dalam bertindak dan sadar akan kepentingan umum atau social.

3. Pengawasan yang Efektif dan Efisien

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen atau administrasi. Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan.

Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan. Selama ini pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS cukup pada tataran pelaporan saja, sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang, pihak pengawas, kantor dinas atau pemerintah, merasa cukup dengan laporan yang ada diatas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan, belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan, sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS. Pengawasan melekat dan pengefektifan tenaga pengawasan yang ada bisa jadi menjadi solusi bagi pengawasan yang efektif.

4. Pendampingan Dari Ahli Yang Kompeten

Tidak sedikit juga sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan sengaja, ada juga factor ketidaktahuan, atau ketidaksengajaan, sehingga oleh oknum-oknum pendidikan diperdaya dan disalahgunakan. Oleh karena itu, pendampingan dari ahli yang kompeten bisa menjadi solusi untuk masalah ini. Ahli yang dimaksud bukan hanya professor atau dosen dari ahli keuangan, tapi minimal orang atau lembaga social yang faham pengelolaan pendidikan, sehingga pemahaman terhadap pengelolaan pendidikan akan menjadi dasar yang kuat bagi teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Hal ini dikarenakan di sekolah belum ada tenaga professional yang menangani manajemen sekolah, tenaga yang ada hanyalah lulusan SMA atau bahkan SMP,

sedangkan untuk mengelola dana sebesar ini dibutuhkan beberapa kompetensi yang utama, disamping tentunya kompetensi manajerial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan pada`sekolah dasar negeri diKecamatan Kulisusu kabupaten Buton Utara terdiri dari bebrapa item. Seperti yang diungkapkan oleh :

Hadis dan Nurhayati (2010: 3) mengatakan bahwa :

“Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional”.

Hal ini juga didukung oleh teorinya B. Suryosubroto (200: 32-131) yang mengatakan bahwa :

“Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu adalah suatu hal yang penting di suatu sekolah. Manajemen pendidikan di sekolah meliputi: “manajemen kurikulum, manajemen murid, manajemen personil (guru dan staf), manajemen tata laksana sekolah, manajemen sarana pendidikan dan manajemen keuangan sekolah”.

Berdasarkan kedua pandangan diatas bahwa manajemen pendidikan sangat dibutuhkan sekolah dalam hal peningkatan mutu pendidikan disekolah termasuk faktor lainnya. Adapun faktor tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Manajemen kurikulum

Dalam manajemen kurikulum kegiatan dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid (B.Suryosubroto: 2004: 33). Organisasi kurikulum sangat erat berhubungan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai karena pola-pola yang berbeda

akan mengakibatkan isi dan cara penyampaian pelajaran berbeda pula.

Kegiatan ini ada dua yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru dan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, meliputi : pembagian tugas mengajar, pembagian tugas/tanggung jawab dalam membina ekstra kurikuler dan koordinasi penyusunan persiapan mengajar.

Kegiatan yang berhubungan dengan tugas mengajar adalah tugas guru mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tugas ini sesuai jadwal yang diberikan kepada guru. Sedangkan kegiatan dalam membina ekstra kurikuler adalah tugas guru dalam kegiatan di luar kurikulum (ekstra) seperti olah raga dan kesenian, UKS, Pramuka dan sebagainya. Tugas ekstrakurikuler adalah tugas yang dilaksanakan sebagai penunjang pendidikan

Kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar, meliputi penyusunan jadwal, penyusunan program (RPP) pengisian daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil evaluasi dan kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dasar negeri bahwa pembuatan RPP rata-rata mengadopsi dari sekolah lain sehingga sekolah tidak berdasarkan pada kondisi sekolah. Ini salah satu kelemahan kurikulum yang mengakibatkan tidak maksimalnya peningkatan mutu pendidikan disekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu.

2. Manajemen Murid

Manajemen murid adalah mengatur dan mengelola masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, seperti seleksi murid baru. Manajemen ini dalam seleksi murid sekolah perlu membentuk panitia penerimaan murid baru, menentukan syarat pendaftaran murid atau siswa, dan menyediakan formulir pendaftaran.

Selain itu majamene murid juga mengatur tentang buku induk, buku klaper, tata tertib siswa dan presensi siswa. Hal-hal tersebut sangat penting dalam rangka melayani kebutuhan siswa. Dengan adanya manajemen murid atau siswa guru atau pegawai sekolah mudah dalam melayani siswa, karena salah satu contohnya dengan Buku Induk dapat mengakses hal-hal yang penting yang berhubungan dengan siswa. Dengan manejemen murid yang baik maka sangat dimungkinkan sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah. Contoh dengan manajemen murid yang maka guru atau pegawai dapat menentukan alokasi dana BOS kepada siswa yang menerima bantuan.

3. Manajemen Personil (Guru dan Staf)

Manajemen personil adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang tersedia. Kepala sekolah wajib mendayagunakan seluruh personil secara efektif dan efesien agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah tercapai dengan optimal. Cara pemberdayaannya dengan jalan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing atau dengan kata lain perlu adanya *job description* yang jelas.

Dalam rangka pelaksanaan manejemen personil perlu adanya arsip yang menyimpan data-data tentang personil yang ada di sekolah Seperti daftar personil, daftar hadir dan lain-lain. Hal ini penting manakalah dibutuhkan dalam suatu waktu

maka tinggal mencari dan membuka arsipnya saja.

4. Manajemen Tata Laksana Sekolah.

Manajemen tata laksana sekolah adalah pengelolaan kegiatan seperti surat menyurat, ekspedisi, notulen, pengumuman, pemeliharaan gedung, perlengkapan sekolah, halaman sekolah dan sebagainya. Manajemen dibidang ini merupakan salah satu manajemen yang dapat mempengaruhi kemajuan suatu sekolah. Oleh karena itu dalam melaksanakan manajemen tersebut sekolah perlu menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Contohnya adalah dalam pemeliharaan perlengkapan sekolah (seperti Laboratorium sekolah), perlu ada petugas yang mengelola laboratorium untuk memelihara agar tetap bersih, aman dan dapat digunakan manakala dibutuhkan. Petugas dapat melaporkan kondisi perlengkapan sekolah, sehingga apabila ada yang kurang atau rusak kepala sekolah segera dapat menangani. Hal ini penting agar tidak mengganggu jalan proses belajar mengajar.

5. Manajemen Sarana Pendidikan.

Manajemen pendidikan adalah pengelolaan yang berhubungan dengan tiga hal yaitu : alat pelajaran, alat peraga, media pengajaran. (Kiki Bagus 2013: 114).

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan langsung proses belajar mengajar. Alat ini seperti buku, alat tulis, alat praktek. Alat peraga adalah alat pembantu dalam proses belajar mengajar, seperti gambar atau perbuatan yang memberi pengertian kepada siswa. Sedang media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan.

Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah sangat mungkin dapat membeli media pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Logikanya dengan sarana pendidikan yang cukup maka guru dapat mengajar dengan baik dan siswa dapat belajar dengan baik. Sebaliknya apabila sarana pendidikan kurang tercukupi guru kesulitan dalam mengajar dan siswa kesulitan dalam menerima pelajaran sehingga mutu pendidikan akan rendah.

6. Manajemen Keuangan Sekolah

Manajemen keuangan suatu kegiatan pengelolaan dibidang keuangan seperti pengelolaan keuangan yang berasal dari Negara untuk gaji guru dan karyawan dan belanja barang, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk berbagai kegiatan seperti : pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, pembiayaan kegiatan pembelajaran, pembiayaan ulangan, pembelian bahan-bahan habis pakai untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, pembiayaan perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, pembiayaan pengelolaan BOS seperti pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mobile sekolah.

Dengan manajemen keuangan sekolah yang baik yang transparan, tepat sasaran, serta efisien maka sekolah dapat menentukan arah kemajuan. Karena segala kegiatan sekolah ada konsekuensinya yaitu membutuhkan dana. Oleh karena

pengelolaan dana sekolah salah satunya BOS dengan baik bisa mempengaruhi kemajuan suatu sekolah.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian dana BOS di SD Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara di uraikan sesuai tahapan yaitu sebagai berikut:

1. perencanaan sarana dan prasarana

Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dan mencakup kebutuhan sangat membantu dan menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks, karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun local, perencanaan ini merupakan system perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pelayanan dan tujuan yang ditetapkan.

Program pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja akan berbeda dengan program pendidikan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar, dalam hal sarana dan prasarananya, karena itu dalam perencanaan kebutuhan tersebut dikaji system internal pendidikan dan aspek eksternalnya seperti masalah demographi, ekonomi kebijakan-kebijakan yang ada. Kegagalan dalam tahap perencanaan sarana dan prasarana ini akan merupakan pemborosan dan tidak efektif dalam implementasinya.

Perencanaan opsional dalam menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan setelah target sarana prasaran pendidikan ditetapkan, maka lembaga pendidikan harus menyusun rencana peningkatan mutu sarana

prasarana pendidikan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang: aspek-aspek mutu sarana prasarana pendidikan yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan untuk sarana pendidikan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan lembaga dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah dan orang tua peserta didik baik secara moral maupun fisik untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan tersebut.

Yang perlu di perhatikan oleh pendidikan di Kecamatan Kulisusu dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi *Stakeholder* pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan pendidikan dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus di tanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta didik dalam program ini bisa dihindari.

Setelah target sarana prasarana pendidikan ditetapkan, maka pihak pendidikan harus menyusun rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang: aspek-aspek mutu sarana prasarana pendidikan yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus di tempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan, dan dimana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan untuk sarana prasarana pendidikan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pendidikan di Kabupaten Buton Utara dalam menjelaskan dan

memperoleh dukungan dari pemerintah dan orang tua peserta didik baik secara moral maupun fisik untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan tersebut. Namun dalam pelaksanaan perencanaan ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang kurang mendukung dari pada pelaksanaan program tersebut.

2. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Kulisusu, yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana program ini adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi Stakeholder pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat (komite sekolah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan manajemen ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana untuk melaksanakan peserta didik program ini bisa di hindari. Dalam melengkapi sarana tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal karena system pendanaan yang belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan penunjang untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan akan mengarah pada kerusakan, kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainnya. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang kontinyu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan yang baik dan siap

untuk dipergunakan. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan dengan pengadaaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukan bagi kelangsungan “*building*, “*equipment*, serta ‘*furniture*”. Termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, perabot perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimuai semenjak hari pertama gedung, perabot dan perlengkapan itu diterima dari pihak pemborong, penjual atau pembeli sarana tersebut, kemudian disusul oleh proses kepunahan meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadap sarana tersebut selama dipergunakan rutin melaksanakan pemeliharaan setiap tahun seperti yang diungkapkan oleh informan mengemukakan bahwa:

Tentang pemeliharaan sarana pendidikan yang ada pemeliharaan rutin setiap tahun yang dibayai oleh dana rutin lewat DIPA atau BOS atau melakukan sering dengan komite apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. Namun karena dana yang disiapkan cukup terbatas sehingga pemeliharaanyapun belum optimal, hal ini tersebut juga karena sarana tersebut sudah saatnya untuk diganti. (wawancara 5 Mei 2014).

Persoalan sarana pendidikan yang ada disekolah merupakan tanggungjawab bersama antara seluruh stakeholder sekolah karena tanpa sarana yang layak dan mendukung proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan bisa meningkatkan mutu pendidikan.

3. Penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana pendidikan

Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab pada setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi pendidikan di Kabupaten Buton Utara yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana pendidikan diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. Yang perlu di perhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah:

1. Penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya.
2. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama.
3. Waktu/jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran.
4. Penugasan/penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya.
5. Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, antar kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler harus jelas.

Dengan demikian bahwa penggunaan atau pemakaian dari pada sarana pendidikan yang ada dianggap sudah saatnya untuk rehabilitasi karena ada yang sudah kurang layak untuk dipergunakan dan apabila hal tersebut di biarkan maka akan menghambat proses pelaksanaan program pendidikan di Buton utara karena fasilitas kurang layak untuk di pergunakan.

4. Sumber daya manusia

Pelaksana pendidikan memerlukan kompetensi setiap pendidik dan tenaga pendidikan yang sesuai sehingga mampu mengelola dan memanfaatkan setiap saran pendukung yang tidak mampu menyamai perlengkapan yang diberikan dan ini dapat berakibat pada proses pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara sesuai hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Kulisusu mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara telah berjalan dan dilaksanakan sebagaimana adanya, namun ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dialami dalam pelaksanaan pendidikan di kecamatan kulisusu karena sumber daya yang melaksanakan pendidikan sangat terbatas latar belakang yang sesuai dengan pendidikan tersebut. (wawancara, 10 Mei 2014).

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah

dasar (SD) kecamatan Kulisusu bahwa sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan terbatas, sehingga dalam pertanggung jawaban kebijakan perlu tenaga teknis yang mendampingi.

5. Implementasi standar sarana dan prasarana pendidikan.

Penyusunan standar sarana dan prasaran diharapkan mampu memberikan motivasi dalam mendukung dan meningkatkan pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Namun penerapan atau implementasinya secara keseluruhan tidak mudah, meskipun standar nasional merupakan kriteria minimum tidak setiap pendidikan mampu memenuhinya. Implementasinya pun dilakukan secara bertahap dan diutamakan kebutuhan yang benar-benar diperlukan dalam proses pembelajaran. Setiap sarana prasarana yang di siapkan mewakili kebutuhan utama dari sebuah pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal.

Pada dasarnya dengan standar nasional pendidikan diharapkan mampu meratakan segala kegiatan maupun sarana pendukung dalam pendidikan yang meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Namun selalu ada implikasi dari setiap penerapan sebuah kebijakan, dan tidak pula dengan standar sarana dan prasarana, karena implikasi dari penerapannya menimbulkan kendala-kendala dan permasalahan baru yang pemecahannya tidaklah mudah karena akan berkaitan dengan standar nasional yang lain. Misalkan saja kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan kelulusannya, penilaian dan pengelolaan maupun pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dan merata.

Implikasi berkaitan dengan akibat dari implementasi sebuah program atau kegiatan dalam implementasi standar sarana dan prasarana tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah implikasi dari penerapan tersebut. Bila setiap saran

dan prasarana yang diadakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam standar, maka akibat yang mungkin terjadi seperti yang diuraikan diatas adalah munculnya kebijakan lain yang berkaitan dengan pilihan untuk memenuhi terlebih dahulu kebutuhan utama dari sebuah pendidikan ataupun satuan pendidikan. Demikian pula dengan perlengkapan setiap ruang selalu dilakukan dengan bertahap dan berkelanjutan. Apabila dilakukan dengan secara langsung yang sesuai dengan ketentuan hambatan yang paling utama adalah pemeliharaan maupun pembiayaan yang tidak mencukupi dan memadai bagi saran dan prasarana yang disiapkan.

Pembangunan yang disesuaikan dengan ketentuan sebuah bangunan pada lahan yang tersedia akan memberikan dampak pada sempitnya ruang bermain/olahraga ataupun pembangunan sarana yang lainnya seperti laboratorium, UKS maupun perpustakaan. Kendala ini biasanya ditemui dikota-kota besar yang tidak memiliki lahan yang begitu luas, atau meskipun memiliki lahan yang luas, dengan penerimaan peserta didik yang tidak sesuai dengan rasio minimum dalam setiap kelas menjadikan penambahan gedung yang lebih banyak. Pembangunan sarana dan prasarana pada pendidikan menurut pandangan dari beberapa sumber yang diwawancarai peneliti mengungkapkan bahwa:

Memang kita bangun sarana prasarana itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi seperti ukuran ruangan belajar itu sesuai dengan ukuran standar, ya, 8 x 9m. jadi saya kira kalau berbicara mengenai sarana prasaran saya pikir untuk ini adalah sekolah yang relative baik, menurut ukuran kita, iya kan? Namun fasilitas lain masih dirasa belum mencukupi seperti laboratorium, kalau kegiatan pembelajaran saya kira termasuk lengkap, perpustakaan juga ada namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. (wawancara 11 Mei 2014).

Sejalan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana, dalam rangka mendukung

terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, tentu harus perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana baik sarana utama maupun sarana pendukung, sangat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Sarana utama berupa ruang belajar yang nyaman dan laboratorium yang memadai didukung oleh sarana-sarana pendukung yang lain memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Jika sarana dan prasarana yang tersedia menjadi standar pembelajaran pada pendidikan akan memberikan kontribusi yang menentukan pula, lahirnya lulusan-lulusan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai agar dapat tetap memberikan kegunaan yang optimal atau memerlukan perawatan yang baik dan kontinyu. Perawatan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga-tenaga yang memang kompeten di bidangnya.

Dari standar nasional pendidikan yang tersedia faktor penghambat tidak terlalu berarti, tinggal bagaimana komitmen dan kemampuan manajerial pada setiap stakeholder seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah SD di kecamatan Kulisusu mengemukakan bahwa:

Penghambat sebetulnya tidak terlalu bermasalah, hanya yang jadi penghambat itu adalah ketidak updatean atau update informasi dari tenaga edukasi, tenaga-tenaga kependidikan lainnya itu bagian dari penghambat kecil, tapi kalau itu manajemen mempersiapkannya, dan mempersiapkan sarana komunikasi, jaringan internet itu bagian dari pendukung, tapi kalau tidak, itu bagian dari penghambat (wawancara 15 mei 2014).

Berdasarkan data yang ada yang menjadi penghambat utama dalam mengelolah dan mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan BOS di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara setiap tahunnya, relative sama karena jumlah siswa yang ada juga relative sama dari 3 (tiga) tahun terakhir.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Kulisusu mengemukakan bahwa:

Dari segi prestasi akademik saya tidak terlalu sanksi sebenarnya, walaupun semua fasilitas dan sarana yang ada disini sudah kurang memenuhi standar pendidikan. Hal tersebut perlu pembenahan, menambahkan apa yang rusak, kan begitu. Yang menyangkut persoalan prestasi ekstrakurikuler, ini yang perlu didorong terus, apakah itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya, ini perlu di dorong terus supaya dia berkesinambungan. Bukan hanya prestasi akademik tapi dia juga berprestasi dari segi yang lainnya. (wawancara April 2014).

Sehingga kalau ditinjau lebih jauh, perhatian masyarakat terhadap eksistensi pendidikan Kecamatan Kulisusu masih bersifat “elitis” terbatas pada kalangan tertentu saja. Benar bahwa dalam sejarahnya pendidikan di Buton Utara merupakan lembaga pendidikan yang dibangun dan dikelola atas inisiatif masyarakat, tetapi kepemilikannya masih bersifat eksklusif. Meskipun mengakar kuat, pendidikan di Buton utara masih merefleksikan kerja individual ketimbang kolektif. Hal ini mengakibatkan *sense of ownership* masyarakat terhadap pendidikan rendah.

Kondisi tersebut perlu dijadikan bahan pemikiran oleh pihak *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan, di Buton Utara untuk mengembangkan suatu system perbaikan pendidikan yang berkelanjutan (*continous quality improvement*) sampai sekarang. Nampak bahwa perbaikan yang dilakukan itu parsial, tidak ada kesinambungan, dan hanya bersifat tambal sulam.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa teori yang dipergunakan untuk mendukung implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yang di kemukakan oleh:

Edward III (1980:9-10) mengatakan bahwa : Ada 4 faktor yang mendukung kebijakan pemberian dana BOS dalam meningkatkan Mutu Pendidikan yaitu : (1) komunikasi, (2) Disposisi,(3) kualitas sumber daya manusia, (4) struktur birokrasi.

Kemudian dalam proses implementasi kebijakan bukan saja aspek pengetahuan yang dikembangkan tetapi juga aspek keterampilan dan aspek sikap, tetapi keempat faktor tersebut bisa berjalan dengan sinergis sehingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pengembangan sumber daya manusia.

Adapun faktor – faktor tersebut seperti yang diungkapkan oleh Edwar III adalah :

1. **Komunikasi.**

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumberdaya.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi.

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Sehingga dapat dikatakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi.

Organisasi yang menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standard operating procedures* (SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS memang sudah banyak disinyalir di beberapa tempat, namun tentunya juga hal ini tidak bisa

digeneralisasikan di semua tempat dan kondisi penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi, namun jika dilihat dari segi peluang atau kesempatan, banyak sekali peluang yang bisa digunakan oleh oknum untuk bisa melakukan penyelewengan. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku.

Menghapuskan kebijakan pendidikan yang bersubsidi jelas bukan menjadi solusi, karena memang pada intinya pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi, dan juga Undang-Undang kita telah mengamanatkan untuk memberikan layanan gratis untuk pendidikan dasar. Oleh karena itu, penghapusan sama sekali kebijakan BOS bukan merupakan solusi bagi kemelut pengelolaan dana BOS.

Peningkatan mutu pendidikan yang di maksudkan dalam penelitian ini dilihat dari keberhasilan atau tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu. Proses pencapaian tujuan dan sasaran tersebut mencakup lingkup organisasi, untuk menyelenggarakan tugas secara efisien dan efektif.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Manajer BOS Pendidikan Sekolah Dasar Kecamatan Kulisusu mengatakan bahwa:

Dalam sosialisasi program Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu kami dari pihak Dinas Pendidikan melibatkan langsung para kepala sekolah terhadap sosialisasi tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam sosialisasi tersebut agar para peserta mengetahui secara pasti tentang penggunaannya dana BOS dan mempertanyakan apa yang menjadi kendala dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, (wawancara bulan April 2014).

Sejalan yang dikemukakan oleh Nugroho (2003: 263) mengatakan bahwa kebijakan yang ideal adalah harus kontestual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini di masa depan.

Selanjutnya Agusti (2001: 50) mengatakan bahwa :
“Menyebut model seperti ini sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan public, sebuah pola yang banyak diadopsi oleh Negara-negara berkembang dan maju dikawasan Asia. Dengan model ini dapat disertakan dengan model kebijakan yang menggunakan rasio “untung-rugi” dari sebuah kebijakan, seperti yang diperkenalkan dalam paradig *cost benefit analysis*”.

Pada prakteknya ternyata memang demikian adanya, Setiap kebijakan harus mengandung unsur pragmatisme dan untung rugi. Tentu saja, pemahamanya pertama kali diletakkan di dalam konteks etika yaitu tentang kebaikan dan keburukan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagai adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan. Hal ini menuntut kepekaan dan daya tanggap pejabat publik untuk menangkap dan memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. selanjutnya, tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga di tuntutan untuk melakukan tindakan dalam bentuk **suatu kebijakan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.**

Menurut Anderson (1997: 3) mengatakan bahwa :
“Kebijakan public adalah (*a purposive course of anation followed by an actor on set actors in dealing with a problem or matter of concern*). Jadi pada prinsipnya bahwa kebijakan public adalah sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kulisusu mengemukakan bahwa:

Pada prinsipnya bahwa kebijakan pemberian dana BOS, sangat terbantu yang dirasakan oleh sekolah, karena sekolah dapat berkreasi untuk menata sekolah sesuai usulan program yang dilakukan, namun karena program tersebut terbatas sesuai jumlah siswa pada sekolah tersebut sehingga sekolah yang kurang muridnya juga sangat terbatas dana yang diterima. (hasil wawancara, 28 April 2014).

Hal ini di dukung oleh Dye (1987: 68) mengatakan bahwa :
“Memberikan batasan mengenai kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (*Whatever government choose to do or not to do*)”.

Berdasarkan paparan diatas bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektif) dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik Sebab sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya Wildavsky (1978:342) mendefinisikan bahwa :
“Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi awal serta akibat yang dapat diramalkan. Prngertian-pengertian kebijakan tersebut lanjut Wildavsky mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) Bahwa kebijakan public dalam bentuk awalnya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. (2) Bahwa kebijakan public itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. (3) Bahwa kebijakan public itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. (4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan yang jelas dalam rangka merespon masalah-masalah publik yang berkembang. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan yang ingin dicapai dari beberapa alternatif yang signifikan, mulai dari

proses hingga implementasinya. Idealisasi perumusan kebijakan, tiada lain adalah merupakan langkah yang strategis dalam setiap roda organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk sumber daya bahwa dengan adanya kebijakan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah saat ini, dengan dukungan dana tersedia dalam program kebijakan tersebut, namun karena program tersebut turun dananya ada sekolah yang sangat terbatas sehingga biaya tersebut tidak mencukupi sekolah untuk berkreasi. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu mengemukakan bahwa:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah berjalan selama beberapa tahun, namun ada beberapa masalah yang selalu timbul, diantaranya yaitu karena pemahaman tentang pengelolaan dana tersebut yang kurang akurat sehingga ada sekolah yang membelanjakan dana tersebut yang kurang sesuai dengan perencanaan kebutuhan. (Hasil Wawancara, April 2013).

Demikian pula hasil penelitian, bahwa banyak masyarakat yang kurang layak mendapatkan program tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, tapi kenyataannya mendapatkan program tersebut, hal ini terlihat adanya kolusi, nepotisme ataupun kinerja petugas yang relative masih rendah. Disisi lain salah tujuan kebijakan pemberian dana BOS, untuk sekolah-sekolah tersebut adalah untuk membantu sekolah meningkatkan biaya operasionalnya, bahkan diharapkan dapat menanggulangi segala kegiatan yang berhubungan dengan operasional sekolah, sehingga siswa tidak lagi di bebani untuk penyiapan berbagai fasilitas pembelajaran, namun karena pelaksana kebijakan kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, sehingga masih perlu pembenahan.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, mengatakan bahwa:

Banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pada umumnya masyarakat mempertanyakan bahwa BOS adalah untuk membiayai anak-anak mereka, termasuk perlengkapan sekolah, hal tersebut karena BOS kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ada yang mempertanyakan hal tersebut, padahal dana BOS bukan hanya membiayai anak-anak yang kurang mampu tapi ada lebih sepuluh item yang harus dipertimbangkan dalam penggunaannya. (Hasil Wawancara, April 2014).

Dari hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu, karena kurang sosialisasi atau komunikasi dari pihak sekolah tentang hal tersebut. Dengan demikian bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu, belum dimanfaatkan secara optimal untuk operasional sekolah.

Dampak perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap kelompok masyarakat terhadap tujuan undang-undang dan output-output kebijaksanaan lembaga-lembaga pelaksana memainkan peran yang cukup penting dalam proses implementasi. Dalam kaitan ini dilema yang biasanya dihadapi oleh para penganjur program apapun yang berusaha untuk mengubah perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran ialah bahwa derajat dukungan public atas program-program tersebut berbeda-beda dari waktu ke waktu. Biasanya, undang-undang itu lahir sebagai akibat dari semakin kuatnya perhatian serta keprihatinan masyarakat terhadap masalah-masalah umum, semisal masalah pelestarian lingkungan,

perlindungan konsumen, atau pembebasan biaya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Tugas yang amat penting yang dihadapi oleh para pendukung suatu program adalah menjabarkan dukungan yang tadinya meluas (yang memungkinkan lolosnya rancangan undang-undang yang kini telah menjadi undang-undang) menjadi organisasi yang memiliki keanggotaan, ketangguhan, dan pengalaman yang cukup sehingga bias diterima sebagai partisipan yang sah dan menentukan dalam keputusan kebijakan, baik oleh pejabat pelaksana maupun oleh badan legislatif dan eksekutif atasan mereka. Sebaliknya, para penentang program sekalipun mereka mungkin tidak mendominasi badan-badan pelaksana pada umumnya memiliki sumber-sumber dan insentif untuk aktif campur tangan dalam proses implementasi. Sumber-sumber organisasi dan keahlian yang mereka miliki memungkinkannya untuk secara efektif mengajukan masalah mereka pada badan-badan administrative dan, jika mereka tidak puas dengan keputusan-keputusan badan-badan ini, mereka pun dapat mengambil prakarsa untuk menghimbau badan-badan legislatif atasan, badan-badan peradilan, dan mempengaruhi pendapat umum.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk disposisi atau sikap pelaksana bahwa dukungan sekolah cukup tinggi terhadap kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu. Namun demikian walaupun guru-guru meraskan adanya penambahan operasional mereka, tetapi pada umumnya mengatakan bahwa kebijakan Pemberian Dana Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu belum bisa mengubah perilaku mereka dalam hal

peningkatan kesejahteraan sehingga pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) relative belum terlaksana dengan baik sesuai tujuan, salah satu penyebabnya secara umum adalah tingginya tingkat kebutuhan hidup.

Sejalan dengan yang ungkapkan Coimbs (1983: 14) mengatakan bahwa :

“Bila bentuk pendidikan formal tidak mampu dilakukan oleh penduduk miskin, maka pemerintah Negara berkembanglah yang harus membuat kebijakan pendidikan nonformal untuk mengatasi kesempatan kerja, urbanisasi, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesehatan serta gizi. Pendidikan non formal ini bias berupa penyuluhan, penataran, kursus, maupun bentuk keterampilan teknis lainnya”.

Sasaran dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kaum petani, pengrajin, nelayan, pertukangan, pengusaha kecil, pedagang dan lain sebagainya, yang tergolong penduduk miskin. Informasi berupa pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang menumbuhkan nilai dan sikap efektif penduduk miskin merupakan dasar bagi aktivitas hidup dan perubahan kehidupan, informasi memiliki makna penting bagi peningkatan aset sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memacu produktivitas kerja, kemandirian, dan perubahan kehidupan sosialnya.

Dari hasil penelitian pada dimensi kualitas sumber daya dalam hal pengelolaan bahwa pada umumnya sekolah yang menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu, pada umumnya mengatakan bahwa perlu penambahan biaya tersebut karena dana tersebut untuk sekolah-sekolah terpencil tidak mencukupi untuk operasional sekolah karena muridnya yang kurang. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti yang dikemukakan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kulisusu yaitu:

“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, namun karena keterbatasan murid sehingga tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di sekolah, biaya yang terbesar secara umum terdapat pada poin C”. (Hasil Wawancara, April 2014).

Hasil penelitian menunjukkan dari kualitas sumber daya adalah cukup dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu, berkaitan dengan indikator-indikator dari pembentuk dimensi kualitas sumber daya belum dilaksanakan secara optimal.

Ada dua pendekatan pelaksana kebijakan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan seperti yang disampaikan oleh :

Wibawa (1994: 96) mengatakan bahwa :

1. Pendekatan kepatuhan, seorang yang menggunakan pendekatan ini beranggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi-atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Asumsi yang mendasari pemahaman ini adalah: pembuat kebijakan merupakan pihak yang kaya informasi dan oleh karenanya kebijakan- cara-cara merealisasikan tujuan kebijakan yang dibuatnya itu telah dengan sempurna.
2. Pendekatan perpektif “*what’s happening*” (apa yang terjadi). Pendekatan ini memotret pelaksanaan suatu kebijakan atau program dari segala hal. Apa saja yang berlangsung didalam (terhadap) program dijelaskan oleh pendekatan ini, karena ia mendasarkan diri pada asumsi bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan di pengaruhi oleh segala ragam variable dan factor. Dengan demikian, apa yang melibatkan dan berlangsung didalam implementasi jauh lebih penting untuk ditangkap dan dikaji ketimbang selalu mempersoalkan sesuai-tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilakukan.

Untuk dapat menangkap secara spesifik tujuan implementasi kebijakan maka pelaksana kebijakan harus benar-benar mengetahui tentang pesan kebijakan tersebut. Wawancara antara pembuat kebijakan kadang-kadang menghasilkan informasi yang berharga tentang apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan.

Menurut Wibawa (1994 :20) mengatakan bahwa :

“Untuk melaksanakan kebijakan secara efektif menurut tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana maupun insentif lain. Kinerja pelaksana kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai. Selain kejelasan standard an sasaran juga tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun actual, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi”.

Hal ini didukung oleh pendapat lain yang diungkapkan oleh :

Ripley (1973: 10) mengatakan bahwa :

“Kualitas sumber daya memiliki enam variabel, yang semuanya harus dicermati oleh seorang evaluator, yaitu: (1) kompetensi dan jumlah staf; (2) rentang dan derajat pengendalian; (3) dukungan politik yang dimiliki; (4) kekuatan organisasi; (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi; (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan”.

Kesemua variabel tersebut membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, yang pada akhirnya seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan objektivitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari hasil dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak mengetahui tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila system nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan system nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Hal yang sama juga akan terjadi bila loyalitas pelaksana kepada organisasi rendah.

Sedangkan variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana menurut :

Wibawa (1994: 22) mengatakan bahwa :
kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang, yang terdiri dari 2 (dua) komponen: *pertama*, arah dan ranking tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioritas pejabat-pejabat tersebut; dan *kedua*, kemampuan pejabat-pejabat tersebut dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut, yakni kemampuan mereka untuk menjangkau apa yang dalam keadaan normal dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pentingnya persoalan sikap dan kemampuan ini, tentu saja tergantung pada luas tidaknya kebebasan bertindak yang dimiliki para administrator.

Kesepakatan para pejabat instansi untuk kasus-kasus tertentu sebagian besar merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruh dalam badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Di samping itu, kesepakatan para pejabat juga merupakan fungsi dari kian melembaganya norma-norma professional, nilai-nilai pribadi, dan dukungan bagi tujuan undang-undang dikalangan kelompok-kelompok kepentingan dan lembaga-lembaga atasan di dalam lingkungan politik badan-badan pelaksana. Secara umum, kesepakatan para pejabat instansi terhadap tujuan undang-undang dan sebagai konsekuensinya peluang keberhasilan implementasinya kampanye politik yang gencar. Namun sesudah masa awal ini dilampaui tingkat kesepakatan tersebut mungkin akan merosot terus karena orang-orang yang justru punya kesepakatan tinggi menjadi BOS dengan kerutinan birokrasi dan mereka kemudian digantikan dengan pejabat-pejabat yang ternyata lebih berhasrat dalam menyelamatkan jabatannya dari pada mengambil resiko demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Kesepakatan pada tujuan undang-undang tidak akan membawa banyak manfaat terhadap upaya pencapaian kalau para pejabat pelaksana tidak menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia guna mencapainya. Kemampuan ini yang biasanya

dalam literatur dibahas dibawah rubrik kepemimpinan, terdiri dari unsur-unsur yang bersifat politis dan bersifat managerial.

Betapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi kebijakan dan akuratnya perintah tersebut disampaikan, namun apabila orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya yang penting anantara lain: jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud, dan fasilitas, termasuk bangunan-bangunan, tanah dan suplay untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa hukum dan pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan, serta aturan-aturan yang masuk akal tidak akan disusun.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu, mengatakan bahwa:

Program pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu, yang kami terima selalu kami pertanggung jawabkan sesuai persentase yang terlaksana, sesuai bidang yang kami laksanakan sebab program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu tersebut dilaksanakan untuk kepentingan murid-murid khususnya di Kecamatan Kulisusu, tapi karena kurangnya murid dan pembayarannya pertriwulan sehingga terkadang kami kekurangan biaya opsional (wawancara bulan April 2014).

Agar kebijakan pemberian dana BOS dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah kebijakan, harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus

disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terpesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Sehingga akan terjadi kebingungan para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dan membari peluang untuk tidak diimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki.

Dalam pelaksanaan kebijakan, tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia seperti yang disampaikan oleh :

Robbins (1996: 82) mengatakan bahwa :
“Mengartikan kemampuan sebagai “kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik”.

Kemampuan intelektual menurut adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan/mengerjakan kegiatan mental. Ada tujuh dimensi yang menyusun kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung, pemahaman (*comprehension*) verbal, kecepatan perceptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan (*memory*). Sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakuan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan tangan, kekuatan tungkai dan keterampilan serupa.

Dari hasil jawaban responden terlihat bahwa kualitas sumber daya belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden relatif masih berada pada level cukup, dengan demikian masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu bahwa struktur kualitas sumber daya kebijakan cukup sederhana, namun karena sarana yang tersedia khususnya dalam pertanggung jawaban kebijakan sangat terbatas sehingga perlu tenaga teknis yang mendampingi.

Melalui jawaban informan dapat diketahui bahwa struktur birokrasi dalam pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya dengan kebijakan publik. Dimana pada satu saat kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu menyulitkan masukan pada lingkungan sekitarnya berupa penyampaian kepada orang tua murid tentang keberadaan BOS tersebut dan pada saat yang sama atau yang lain lingkungan sekitar dapat membatasi dan memakasakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambilan keputusan/pembuat kebijakan. Artinya interksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling berpengaruh.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dye (1987: 33) yang mengemukakan bahwa :

“Isi kebijakan Negara yaitu penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan Negara, analisis mengenai akibat berbagai pengaturan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan Negara, penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan Negara terhadap system politik, dan evaluasi dampak kebijakan Negara pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan. Jadi pada prinsipnya bahwa kebijakan Negara cukup dipengaruhi dari struktur birokrasi”.

Pengertian struktur birokrasi yang telah spesifik perlu di pahami dalam pemaknaan yang plural. Ia harus dipahami dalam tiga kategori besar : *pertama*, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial,ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu. *Kedua*, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional seperti: karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan sebagainya. *Ketiga*, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. Tidak hanya itu, beberapa bentuk struktur yang dapat mempengaruhi kegiatan kebijakan politik, baik dilihat dari sisi formulasi, implementasi, hingga evaluasi atau bahkan perubahan kebijakan publik antara lain adalah: karakteristik geografis, variabel demografi, seperti populasi masyarakat, persebaran usia, hingga lokal, budaya politik, sistem sosial serta sistem ekonomi. Negara lain juga memiliki bagian penting dalam struktur lingkungan kebijakan khususnya berkaitan dengan kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu.

Dalam perkembangan kebijakan struktur birokrasi cukup berpengaruh keberhasilan atau kegagalan kebijakan, konteks struktur birokrasi dikedepankan karena perubahan yang terjadi hari ini dan di masa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata-mata di tentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya namun dukungan struktur birokrasi juga turut mempengaruhi.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu mengatakan bahwa:

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kulisusu yang diberikan oleh pemerintah dapat meringankan kebutuhan masyarakat miskin khususnya yang ada dipedesaan, sehingga masyarakat miskinpun dapat mengikuti pendidikan karena sudah ada biaya opsional sekolah yang dibayarkan setiap tiga bulan, hanya karena kekurangan guru-guru di desa sehingga sekolah harus membayar tenaga honorer sehingga biaya tersebut tidak mencukupi untuk operasional sekolah namun sekolah cukup terbantu dengan adanya biaya tersebut (wawancara, 14 April 2014).

Dalam hubungan ini akan dititik beratkan pada pembahasan struktur birokrasi yang banyak diperhatikan oleh para peneliti kebijakan publik, untuk memahami terhadap kebijakan yang tercipta, maka struktur birokrasi memegang peranan yang cukup penting dalam implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara belum berjalan optimal karena masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Melalui jawaban informan, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, banyak dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia pelaksana yang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah, serta struktur organisasi yang ada dalam melaksanakan kebijakan operasional sekolah tersebut yang relative masih rendah. Oleh karena itu, kebijakan pemberian dana BOS perlu mendapat perhatian agar lebih optimal sehingga mencapai tujuannya yaitu terpenuhinya kebutuhan bahan ajar demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah khususnya di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SD Negeri 38 Kulisusu mengatakan bahwa :

sekitar 20 lebih siswa yang putus sekolah karena tidak memiliki perlengkapan sekolah. Tetapi dengan masuknya dana Bantuan Operasional Sekolah bisa ditaktisi dan dimasukkan kedalam program dana BOS, sehingga mereka tadi bisa melaksanakan kembali belajar disekolah dengan teman-temannya ini semua karena hadirnya dana BOS.(Wawancara 28 April 2014).

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan SDM yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang oleh pihak sekolah dan memberikan langkah-langkah yang bisa diterima oleh peserta didik agar mereka tetap melansungkan pendidikan formal ini adalah salah upaya pengembangan Sumber Daya Manusia, hal ini sesuai dengan fakta lapangan, buruknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumber daya manusia (Hadis dan Nurhayati, 2010: 2). Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM) walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah).

Sejumlah faktor menjadi penyebab keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendiknas. Pertama adalah payung hukum yang mengatur mekanisme penyaluran itu masih berupa Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri. Lemahnya sumber daya manusia dan administrasi sekolah juga menjadi hambatan. Sebab, mekanisme baru ini menuntut sekolah negeri mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pemakaian dana BOS, tetapi tidak semua sekolah terutama sekolah dasar di daerah terpencil mempunyai petugas dan kemampuan

administratif untuk menyusun RKA. Di banyak daerah, penerapan ketentuan ini juga beragam karena ada daerah yang bahkan menuntut sekolah menyusun RKA secara detail, sebelum memberikan dana BOS. Padahal SKB Mendiknas dan Mendagri tidak menyaratkan RKA secara detail. Alasan keterlambatan penyaluran dana BOS lainnya yakni di beberapa daerah, DPRD terlambat menyetujui APBD. Padahal SKB tidak menggolongkan dana BOS sebagai bagian dari APBD yang memerlukan persetujuan DPRD. “Ada pula masalah hukum yang tengah dihadapi kuasa pengguna anggaran di daerah yang turut memperlambat penyaluran dana BOS.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahun terhadap penggunaan anggaran negara di institusi pemerintahan, termasuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), selalu memperlihatkan rendahnya

kemampuan pengelolaan anggaran dana pendidikan. Karena itu, sering terjadi kebocoran dan inefisiensi tiap kali akan melangsungkan subsidi sekolah, terlebih terhadap dana proyek bantuan sekolah dari pemerintah.

Lihat saja kebocoran yang terjadi pada penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2007 sampai dengan sekarang ini. Di sana terdapat banyak penyimpangan, mulai pengelembungan jumlah siswa agar bisa dapat dana BOS yang banyak, belum memiliki izin operasional sudah mendapatkan dana bantuan, hingga tidak transparannya sekolah mengelola dana BOS. Belum lagi, penyelewengan dana bantuan berupa block grant maupun spesifik grant. Menurut pandangan saya bahwa dana-dana untuk kebutuhan pembiayaan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan maka pihak pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan harus betul-betul mengawal dana tersebut supaya tidak terjadi lagi kebocoran utamanya didunia pendidikan.

Padahal kalau menyaksikan sendiri di lapangan hingga sekarang masih banyak sekolah yang belum menerima dana BOS karena faktor keterlambatan. Oleh karena itu para pengelola pendidikan harus pontang-panting mencari utang, bahkan banyak yang harus mengeluarkan kocek sendiri demi berlangsungnya proses pendidikan sambil menunggu dana BOS turun. Yang seharusnya dana pendidikan khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus selalu diperhatikan agar supaya tidak terjadi keterlambatan karena sekolah sangat membutuhkan dana tersebut untuk berlangsungnya proses pendidikan dilapangan khususnya sekolah dasar Negeri yang ada di Kecamatan Kulisusu. Kalau dana pendidikan ini khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selalu

terlambat kekhawatiran yang terjadi akan muncul tidak terpenuhinya program sekolah yang telah dituangkan dalam rencana anggaran.

Fenomena itu memperkuat dugaan bahwa birokrasi pendidikan kita kurang serius, transparan dan tidak profesional mengelola anggaran pendidikan. Yang terpenting ternyata mental korup masih melekat di mana-mana, tak terkecuali di dunia pendidikan. Di sisi lain, terdapat indikasi faktual yang semakin menyadarkan kita bahwa pada prinsipnya masalah utama bobroknya pendidikan nasional bukan hanya terletak pada minimnya anggaran, kualitas SDM yang lemah dan kaburnya visi pendidikan nasional. Lebih dari itu, manajemennya juga hancur, baik yang menyangkut manajemen pengelolaan keuangan maupun manajemen dalam konteks administrasi kelembagaan. Lalu apa gunanya dana bantuan sekolah jika kemudian tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan kita.

Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya bergantung pada besarnya dana yang dimiliki Depdiknas, tetapi juga dipengaruhi sektor-sektor lain. Termasuk kejujuran para pengelola pendidikan menggunakan dana bantuan sekolah yang selama ini menjadi program prioritas Mendiknas. Kita paham adanya dana bantuan sekolah punya maksud baik, tetapi di sisi lain hal itu justru bisa menjadi bumerang karena akan memperparah mental korupsi di lingkungan Depdiknas. Lalu, apa antisipasi kita? Diperlukan standarisasi penyaluran dana bantuan yang tegas dari pemerintah, termasuk menyeleksi dengan ketat sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan dana bantuan agar tidak jatuh ke tangan-tangan oknum pengelola pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, juga diperlukan aturan yang ketat terhadap para pelaku korupsi dana bantuan

pendidikan. Entah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pejabat atau diturunkan golongan kepangkatannya.

Tujuan program dana BOS menurut Panduan Penggunaan Dana BOS berdasarkan Permendiknas No. 37 Tahun 2010, yaitu: "Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan meningkatkan mutu pendidikan dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun". Implementasi kebijakan dana BOS pada dasarnya membiayai operasional sekolahnya secara mandiri. Kebijakan BOS di satu sisi membantu sekolah negeri/swasta dalam pembiayaan operasional. Orang tua juga terbantu karena dana BOS juga digunakan untuk meringankan iuran orang tua. Berbagai kebutuhan dan fasilitas belajar peserta didik juga sangat terbantu dengan adanya dana BOS. Sementara itu sekolah-sekolah swasta menanggung seluruh pembiayaan, termasuk biaya personalia. Maka kebijakan BOS dimaksudkan untuk membuat pendidikan gratis, sekolah-sekolah swasta hanya sebesar 20% dari anggaran yang diterima. Cakupan dana program BOS dalam pelaksanaannya merupakan pengentasan kemiskinan bidang pendidikan sekitar 20% yaitu membantu kelancaran operasional sekolah, meskipun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi yang cukup bagi sekolah. Namun bentuk layanan sekolah terhadap siswa masih terbatas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

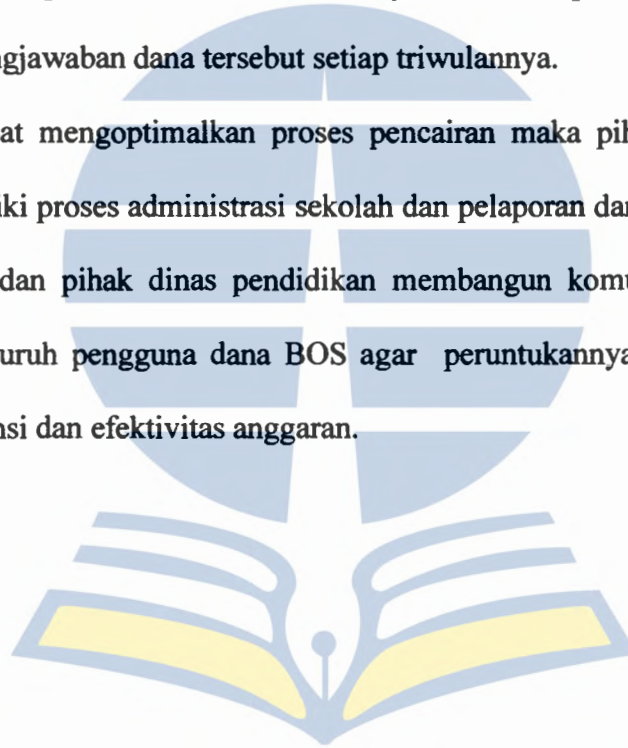
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara telah dilaksanakan sesuai petunjuk dana BOS namun belum berhasil secara optimal.
2. Adapun faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara yaitu pencairan yang selalu terlambat.
3. Walaupun terdapat beberapa masalah dan kendala pada proses pencairan dana BOS tetap masih ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten antara lain mendesak pihak sekolah agar tidak terlambat proses administrasi dan pelaporan dan pihak sekolah mencari dana talangan untuk mengganti kebutuhan dana yang mendesak.

B. saran

1. Agar dapat berhasil dan terlaksana secara optimal program pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara harus ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas pendidikan masalah juknis penggunaan dana BOS dan pengawasan secara rutin kepada pihak sekolah.
2. Agar tidak terlambat proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka pihak sekolah harus menyelesaikan cepat dan tepat laporan pertanggungjawaban dana tersebut setiap triwulannya.
3. Untuk dapat mengoptimalkan proses pencairan maka pihak sekolah harus memperbaiki proses administrasi sekolah dan pelaporan dana BOS tepat pada waktunya dan pihak dinas pendidikan membangun komunikasi yang baik kepada seluruh pengguna dana BOS agar peruntukannya dapat memenuhi asas efisiensi dan efektivitas anggaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Coimbs, Philip H. (1987). *Apakah Perencanaan Pendidikan Itu*. Diterjemahkan Oleh Istiwidayanti. Jakarta : Bhatara Karya Aksara dan Unesco Paris.
- Creswell, John W. (1988). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage.
- Darwin, Muhadjir. (2000). *Implementasi Kebijakan. Modul Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik UGM* : Yogyakarta.
- Dunn, William N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Alih Bahasa: Muhadjir Darwin. Yogyakarta : Hamindita Offset.
- Dunsere, A. (1978). *Implementation in bureaucracy*, Martin Robertson : Oxford.
- Dye, Thomas R. (1987). *Undertanding Public Policy*, Englewood, Cliffs : New Jersey Prentice Hall. Inc.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Edward, G. C. III, (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press : Washington DC.
- , George C, edited. (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc : London-England.
- Effendi, Sofyan. (2000). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Materi Kuliah MAP-UGM* : Yogyakarta.
- Gibson, James. L, (1996). *Organisasi : Perilaku, Struktur*. Jakarta : Proses Bina Aksara.
- Grindle, Merilee., (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*, New Jersey, Princeton University Press.
- Goggin, Malcolm L *et al*, (1990). *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Hogwood, BW, and 'LA,Gunn, (1984). *Policy Analysis for The Real World*; New York : Oxford University Press.
- Hoogerwerf, A. (1978). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Jones, Gareth R., (1995). *Organizational Theory, Text and Cases*, Texas A-M University by : Addison- Wesley Publishing Company, INC.
- Hadis, Abdul dan Nurhayati, (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hamidi, (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.
- Islamy, Irfan, (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Mazmanian, Daniel, and Paul A.Sabatier, (1981). *Effective Policy Implementation* : Lexington Mass DC:Healt. McFarland.
- , (1983). *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company : USA.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan Oleh Tjejep Rohendi Rohidi. UIP : Jakarta.
- Moleong, Lexy J, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Hamid (2013). *Wajib Belajar 9 Tahun Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik*. Jakarta : Dirjen Dikdas.
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Mustopadidjaja, A.R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta : Lembaga Administarasi Negara.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood, (1980). *The Politics of Policy Implementation*. St. Martin Press : New York.
- Putra, Fadillah. (2003). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pramudji. (1983). *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Quade, E.S. (1984). *Analysis For Public Decisions*. Elsevier Science Publishers. : New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition. The Dorsey Press : Chicago-Illionis.
- Sagala, Syaiful, (2007). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

- Siagian, Sondang P., (1994). *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Haji Masagung.
- Salusu, J. (1996), *Proses Pengambilan Keputusan Perencanaan*. Modul Perencanaan Pembangunan. Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan. Kerjasama Depdagri dengan Unhas.
- Soemanto, Wasty. 1992. *Sekuncup Ide Operasional Pendidikan Wiraswasta*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soenarko, SD, (1998). *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Papyrus.
- Soenarya, Endang. (2000). *Teori Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta : Adicita.
- Smith, B.C., (1977). *Policy Making in British Government*, London : Martin Robertson.
- Stillman, Richard J. (1976). *Public Administration. Concept and Cases*. Houghton Mifflin Company : USA.
- Subarsono, (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suryawikarta. (1996). *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta : Gramedia.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit APII Bandung Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Van Horn, Carl & Van Meter, (1979). *Policy Implementation In The Federal System* : Lexington Mass.
- Vebrianto. (1985). *Pengantar Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta : Andi offset
- Vembriarto, ST. (1982). *Sosiologi Pendidikan* Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Paramita.
- Wahab, Solihin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan analisis*. Jakarta : Intermedia.

Winarno, Budi, (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Medpress, Yogyakarta.

Williams, Walter L. (1976). *Social Policy Analysis and Research*, New York : Elsevier.

Zamroni. (2007) . *Meningkatkan Mutu Sekolah* . Jakarta : PSAP Muhammadiyah.

Juknis Dana BOS

Dirjen Dikdas. (2013). *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta : Kemdikbud.

....., 2014. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta : Kemdikbud.

Jurnal

Atmanti, H. D. (2005). *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. Jurnal Dinamika Pembangunan. 2 (1) : 30-39.

Sabatier, Paul, (1986). *Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research* : Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 21-48.

Dokumen dari Internet

Bag. Perencanaan Depdiknas (2010). *Biaya Operasional sekolah*. diakses 1 Oktober 2014 <http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/bos.html>.

Dwi Citra Nurhayati, 2010. Peningkatan Mutu Pendidikan. diakses 28 Maret 2014. Dari situs <http://dwicitraturhariyanti.wordpress.com>.

Dikmudora Surakarta. (2011). Implementasi Penyaluran Bana Bos. Diakses tanggal 1 Oktober 2014 pukul 11.51 Wita. <http://geoenviron.blogspot.com>

Jurnal Kebijakan Publik (2013) Volume 4, No 2, Oktober 2013, hlm.119-218 <http://boedeez.wordpress.com/2012/10/06/penyelewengan-dana-bantuan-operasional-sekolah/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

Jurnal Unair (2013). Mekanisme Penyaluran BOS. Diakses 11 Oktober 2014. <http://edukasi.kompas.com/utak-atik.mekanisme.penyaluran.dana.bos>.

Kiki Bagus. (2013). Efektifitas Manajemen Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Diakses 11 Oktober 2014. (http://m.beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/174522/Hasil_Unas_Surabaya_Jauh_Dibawah_10_Besar).

MATRIKS HASIL WAWANCARA

No	Pedoman wawancara	Hasil wawancara
1	Apakah faktor kurikulum yang ada disekolah bapak/ibu sangat menentukan keberhasilan pendidikan?	Ya. Tetapi disekolah kami belum lengkap dokumen kurikulumnya (dokumen I dan II). Padahal didalam dokumen kurikulum sudah tergambar tujuan pendidikan setiap sekolah yang akan dilaksanakan.
2	Apakah kebijakan pendidikan dengan masuknya dana BOS disekolah bapak/Ibu dapat mempengaruhi mutu pendidikan?	Ya. Sangat mempengaruhi untuk peningkatan mutu pendidikan karena melalui dana BOS sarana untuk kepentingan sekolah seperti buku bisa teratasi melalui dana BOS
3	Apakah Fasilitas pendidikan yang ada disekolah bapak/ibu ada kemajuan sebelum dan sesudah menerima dana BOS?	Ya. Ada kemajuan, sebelum sekolah kami menerima dana BOS kami tidak memiliki laptop, printer dan kelengkapan lainnya, setelah sekolah kami menerima dana BOS semua itu bisa teratasi bahkan genset pun bisa kami adakan melalui dana BOS untuk kepentingan dan kemajuan sekolah
4	Bagaimana pemanfaatan TIK disekolah Bapak/Ibu dengan adanya dana BOS?	Untuk pemanfaatan TIK sebelumnya tidak ada, tetapi dengan masuknya dana BOS sedikit demi sedikit guru sudah mulai memanfaatkannya.
5	Metode yang digunakan oleh bapak/ibu disekolah seperti apa?	Metode yang kami gunakan disekolah berdasarkan petunjuk kurikulum
6	Strategi apa yang digunakan oleh bapak/ibu untuk meningkatkan mutu pendidikan	Salah satu strategi yang digunakan dengan melihat kondisi peserta didik kami dan melakukan pendekatan karena setiap peserta didik berbeda-beda cara memahami pelajaran
7	Apakah dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran mengacu pada peningkatan mutu pendidikan?	Ya. Jika peserta didik kami ada yang tidak tuntas maka kami lakukan remedial atau pembelajaran ulang terhadap kompetensi dasar yang belum tuntas.
8	Apakah siswa dikenakan biaya pendidikan untuk perbaikan mutu pendidikan?	Tidak dikenakan biaya apapun untuk peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan karena sudah ada dalam dana BOS
9	Sumber keuangan yang mana yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan	Sumber keuangan yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan melalui dana BOS dan dana lain yang relevan yang tidak bertentangan dengan aturan.
10	Bagaimana manajemen pendidikan disekolah bapak/ibu?	Manajemen pendidikan disekolah kami belum optimal.
11	Apakah Penggunaan Dana BOS untuk biaya	Ya sangat bermanfaat dalam

	Operasional personil sangat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan?	meningkatkan mutu pendidikan
12	Seperti apa bentuk peningkatan mutu dari penggunaan dana BOS tersebut ?	kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler lancar karena kegiatan ekstrakurikuler bagian dari tanggung jawab untuk peningkatan mutu, karena diberikan transparannya untuk pembina.
13	Apakah dana BOS berpengaruh terhadap mutu pendidikan?	Dana BOS berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah. Karena dengan dana BOS sekolah terbantu terutama dalam pendanaan seperti biaya operasional dan non operasional.
14	Menurut Bapak/Ibu Sdr (i), bagaimana langkah-langkah sekolah dalam mengkomunikasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disekolah saudara?	Kepala sekolah melalui rapat dewan guru menyampaikan tentang dana BOS dan rapat komite, dan sama peserta didik melalui upacara dan apel bahwa sekolah kita mendapat bantuan pendidikan seperti dana BOS
15	Menurut Bapak/Ibu Sdr (i), bagaimana perilaku pelaksana kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan keperluan sekolah atau tidak?	Sikap pelaksana kebijakan dana bantuan tersebut belum begitu optimal memberikan sumbangsi terhadap sekolah.
16	Menurut Bapak/Ibu Sdr (i), bagaimana kualitas para siswa setelah kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini masuk disekolah apakah dapat membantu atau tidak?	Siswa yang memperoleh dana BOS belajarnya meningkat. Dalam UAN kelulusan meningkat dan nilainya juga dapat meningkat dan setelah lulus ujian dapat melanjutkan dijenjang sekolah yang lebih tinggi. Dan siswa yang berprestasi diberikan hadiah untuk kelanjutan studinya lewat dana BOS
17	Menurut Bapak/Ibu Sdr (i), bagaimana struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut	Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan struktur birokrasi belum terbangun secara optimal.

18	Menurut Bapak/Ibu Sdr (i), bagaimana motivasi guru dalam memberikan pelajaran setelah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	Motivasi guru setelah mendapat bantuan dana BOS sangat termotivasi
19	Menurut bapak/ibu bagaimana sumber daya manusia yang ada disekolah setelah masuknya dana BOS?	Sumber daya manusia sangat meningkat pengetahuannya karena dana BOS dapat dipakai untuk peningkatan kualitas guru melalui pengembangan profesi guru seperti diklat.
20	Menurut Bapak/Ibu Sdr (i), bagaimana sistem pengawasan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.	Sistem pengawasan untuk dana BOS belum dijalankan secara maksimal disetiap sekolah.



Lampiran : Penggunaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kulisusu Kabupaten
Buton Utara.

Ada beberapa hal tentang penggunaan dana BOS sebagai berikut:

- a. Pengembangan perpustakaan, diantaranya dapat digunakan untuk mengganti yang rusak, menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku, atau langganan publikasi berkala.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Pembelian/pe ngadaan Buku Teks Pelajarn	1. Pembelian Buku Penjaskes Okt-Des 2011 2. Pembelian Buku Mapel Okt-Des 2011 3. Pembelian Buku Simulasi UAN Apr-juni 2011 4. Pembelian buku paket Erlangga Jilid1,2,3,4,5,6 2012 5. Pembelian buku panduan pendidik SD 2012 6. Pembelian buku detik-detik Ujian Nasional 2012	139 10 19 93 93 30	3.753.000 295.000 171.000 6.419.000 1.500.000 900.000
2	13	Pembelian/pe ngadaan Buku teks Pelajaran	1. Pembelian Buku Penjaskes 1,2,3,4,5,6 Okt-Des 2011 2. Pembelian Buku Matematika 1,2,3,4,5,6 Juli-Sept 2011 3. Pembelian Buku Pengayaan 1,2,3,4,5,6 Jan-Maret 2012 4. Pembelian buku panduan guru matematika kls 1-3, B.indo 1-3, Pkn 1-3, IPA, IPS 1-3 Okt-Des 2012 5. Pembelian Buku Evaluasi Mapel Kelas III dan IV Okt-Des 2013 6. Pembelian buku evaluasi 5 Mapel kelas V dan VI Juli-Sept 2013 7. Pembelian Panduan Soal Ulangan 5 Mapel 1-6 Apr-juni 2013 8. Pembelian Buku 5 Mapel kls 4-6 dan buku soal-soal Ulangan 1-6 Jan-Maret 2013	53 99 142 15 240 230 36 21	1.431.000 2.742.100 1.452.000 750.000 2.400.000 2.300.000 900.000 1.050.000
3	24	Pembelian/pe ngadaan Buku teks Pelajaran	1. Pembelian Buku Pelajaran B. Indo 1-6 Jan-Mar 2011 2. Pembelian Buku pelajaran Simulasi UASBN SD Seri c April-Juni 2011 3. Pembelian buku Pelajaran Penjaskes kls 1-6 Jul-Sep 2011 4. Pembelian Buku teks Pelajaran 4 Mapel	18 15 60 40	643.000 135.000 1.620.000 2.113.000

			5. kls 1-6 Jul-Sept 2012 Pembelian Detik UASBN SD 2012/2013 dan IQRA Jan-Mar 2013	68	1.207.000
4	38	Pembelian/pengadaan Buku teks Pelajaran	1. Pembelian buku penjaskes 1 set Jan-Mar 2011 2. Pembelian buku detik-detik UASBN@36.000 Jan-Mar 2011 3. Pembelian buku IPS Kls IV, B.Indo III, V, VI, MMT V, VI Jul-Sept 2011 4. Buku penjaskes 1,2,4, B.Indo 3,4,5 IPS 4 dan Matematika kls 2 Okt-Des 2011 5. Buku Iqro 1,2,3,4,5,6 Jan-Mar 2012 6. Buku detik-detik UN @35.000 Des 2012 7. Bayar foto kls VI dan I Okt-Des 2012 8. Buku pelajaran pegangan guru Sept 2012 9. Pengadaan buku detik2 UN @35.000 Jan-Mar 2013	1 10 10 5 15 7 38 30 13	2.000.000 360.000 1.802.000 1.400.000 300.000 245.000 825.000 1.500.000 455.000

- b. Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk foto copy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan yang lainnya yang relevan).

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU	
				ME	JML (Rp)
1	12	Kegiatan dalam penerimaan siswa baru	1. Konsumsi Panitia PSB Juli-Sept 2012	7	420.000
			2. Transpor PSB dan pengadaan formulir Jul-Sept 2013	50	642.000
2	13	Kegiatan dalam penerimaan siswa baru	Tidak termuat dalam dana BOS 2011, 2012,2013	-	-
3	24	Kegiatan dalam penerimaan siswa baru	1. Konsumsi panitia PSB Juli-Sept 2012	6	360.000
4	38	Kegiatan dalam penerimaan siswa baru	1. kegiatan PSB dan kelngkpan lain serta konsumsi panitia Jul-Sept 2011	6	745.000
			2. kegiatan PSB dan kelngkpan lain serta konsumsi panitia Jul-Sept 2012	6	845.000
			3. kegiatan PSB dan kelngkpan lain serta konsumsi panitia Jul-Sept 2013	6	1.208.000

- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, diantaranya untuk PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pematapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, foto copy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba).

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU	
				ME	JML (Rp)
1	12	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	1. Transpor pembina olahraga 4 org Jan-Mar 2011	60	1.200.000
			2. Transpor pembina pramuka 2 org Jan-Mar 2011	30	600.000
			3. Transpor 1 pembina dan 2 peserta olimpiade sains Jan-Mar 2011	16/32	600.000
			4. Pembelian alat olahraga (reket dan shuttlecock) Jan-Mar 2011	4/1	900.000
			5. Transpor Pembina olahraga 2 org Apr-Jun 2011		
			6. Transpor pembina pramuka 2 org Apr-Juni	30	600.000
			7. Pembelian alat olahraga (Bed, Net dan Bola) Apr-Jun 2011	30	600.000
			8. Transpor Pembina olahraga dan pembelian alat 2 org Jul-sept 2011	7	580.000
			9. Transpor pembina pramuka 2 org dan pembelian tenda Jul-Sept 2011	35	1.550.000
			10. Pembelian alat olahraga (net, bet, dan bola) Okt-Des 2011	30	3.475.000
2	13	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	1. Transpor Pembinaan olahraga 4 org Jan-Mar 2011	12	600.000
			2. Pembelian alat olahraga (Bola Voli, Net dan Shuttlecock, bola kaki, Net tenis meja, takraw, air mineral Jan-Mar 2011)	11	1.800.000
			3. Transpor pembina olahraga 4 org Apr-Jun	48	600.000
			4. Pembelian alat olahraga (Bola Voli, Net dan Shuttlecock, takraw, air mineral Apr-Jun 2011)	7	850.000
			5. Transpor Pembinaan olahraga 4 org Jul-Sept 2011	12	600.000
			6. Pembelian alat olahraga (Bola	8	393.000

			pimping,shuttlecock, takraw, air mineral Jul-Sept 2011)		
			7. Transpor Pembinaan olahraga 4 org Okt-Des 2011	12	600.000
			8. Pembelian alat olahraga (Bola pimping,shuttlecock, takraw, air mineral Okt-Des 2011)	8	393.000
			9. Transpor Pembinaan olahraga 4 org Jan-Des 2012	192	2.400.000
			10. Transpor Pembinaan olahraga 4 org Jan-Des 2013	192	2.400.000
3	24	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	1. Transpor Pembinaan olahraga 4 org Jan-Mar dan 6 org Apr-Jun 2011	50	500.000
			2. Transpor Pembinaan kesenian 3 org Jan-Mar dan keagamaan 2011	30	300.000
			3. Pembelian alat olahraga (Bola pimping,shuttlecock, takraw, air mineral) Jan-Jun 2011	16	1.590.000
			4. Pembelian tenda pramuka Jan-Mar 2011	1	950.000
			5. Transpor Pembinaan olahraga 5 org dan kesenian 4 org Jul-Des 2011	64	990.000
			6. Pembelian alat olahraga dan 1 tenda pramuka Jan-Mar 2012	7	2.400.000
			7. Transpor pembina kesenian 2 org Apr-Des 2012	20	400.000
			8. Pembelian alat olahraga Apr-Des 2012	10	1.455.000
			9. Pengayaan Kelas VI Apr-Des 2012	65	1.300.000
			10. Pembelian Alat Olahraga Jan-Mar 2013	3	575.000
			11. Transpor Pengayaan Kelas VI 8 org Apr-Des dan kls 1-5 5 org Jul-Des 2013	116	2.620.000
4	38	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	1. Pengayaan kelas VI @35.000 Jan-Jul 2011	26	830.000
			2. Pembinaan bola kaki, takraw,kesenian dan keagamaan @25.000 Jul-Sept 2011	12	900.000
			3. Transpor pengayaan kls 1,2,3,4,5,6 dan pramuka @30.000 Jul-Des 2011	24	5.320.000
			4. Pengayaan kls VI @35.000 Jan-Jul 2012	26	830.000
			5. Pembelian baju olahraga dan pembinaan olahraga, kesenian, keagamaan, pramuka dan pengayaan 1-6 Jan-Mar 2012	12	4.825.000
			6. Pembelian baju olahraga dan pembinaan olahraga, kesenian, keagamaan, pramuka dan pengayaan 1-6 Jul-Des 2012	12	9.420.000
			7. Pembinaan olahraga, kesenian, keagamaan, pramuka @50.000 Jan-Sept 2013	9	10.800.000
			8. Pembelian bola kaki Jan-Mar 2011	1	300.000
			9. Pengayaan Kelas 1-6 Jul-Sept 2013	49	980.000

- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk foto copy/pengandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU	
				ME	JML (Rp)
1	12	Pengembangan sistem penilaian (kegiatan Ul. Dan Ujian)	1. Kegiatan Ujian Sekolah (Ft Copy soal, Konsumsi pengawas dan transpor), Kegiatan Ulangan semester (ft copy soal, transpor dan konsumsi) dan kegiatan Ujian nasional serta pemberian hadiah bagi siswa berprestasi Apr-Jun 2011	4	4.191.500
			2. Kegiatan Ul. Harian (kertas, buku tulis, lem dll) Jul-Sept 2011	1	242.000
			3. Kegiatan Ul. Semester (rental dan Ft copy soal 1-6 Okt-Des 2011	1	1.269.000
			4. Kegiatan Ulangan (pembelian ATK) Jan-Mar 2012	1	440.000
			5. Kegiatan Ul. Dan Ujian (ul. Harian, Ujian Sekolah, Ujian Nasional dan Ulangan semester termasuk konsumsi dan transpor panitia dan pengawas Apr-Jun 2012	4	4.565.000
			6. Kegiatan Ul. Dan Ujian (kertas HVS dan penulisan Ijazah Jul-sept 2012	1	800.000
			7. Kegiatan Ul dan Ujian (rental soal dan ft Copy kls 2-6 serta penulisan buku rapor Okt-Des 2012	2	1.400.000
			8. Pembelian ATK ulangan Jan-Sept 2013	2	310.000
			9. Kegiatan Ul.Harian, Ujian Sekolah, UN, dan Ul.semester (Rental Soal, penggandaan, konsumsi dan transpor) Apr-Jun 2013	4	4.285.000
			10. Kegiatan Ul. (rental Ft Copy soal, konsumsi dan penulisan buku rapor Okt-Des 2013	2	2.172.000
2	13	Pengembangan sistem penilaian (kegiatan Ul. Dan Ujian)	1. Rental Soal Tugas semester kelas 4-6 Jan-Mar 2011	1	1.083.125
			2. Rental soal kelas 4-5 dan ft copynya Apr-Jun dan Okt-Des 2011	2	2.166.250
			3. Ul. Harian kelas 4-6 (rental dan ft copy 6 mapel Jan-Mar 2012	1	843.900
			4. Ul.semster 2(rental dan ft copy soal)kls 4-6, Ujian Sekolah kls 6 dan transpor panitia Apr-Sept 2012	3	1.965.300
			5. Ul. Tengah smster dan Ul. Smster Okt-Des 2012	2	1.998.600
			6. Ul Harian Kelas 4-6 (ft copy soal) Jan-Mar dan Jul-Sept 2013	2	1.696.800

			7. Ul.semester 3-6 (ft copy soal) Apr-Jun dan Okt-Des 2013	2	2.242.800
3	24	Pengembangan sistem penilaian (kegiatan Ul. Dan Ujian)	1. Kegiatan US (rental soal 7 mapel dan ft copy, konsumsi pengawas dan transpor Jan-Mar 2011 2. Kegiatan Ul dan ujian (rental soal dan ft copy, konsumsi dan transpor, penulisan rapor dan penulisan ijazah Apr-Jun 2013 3. Kegiatan Ul. Harian Jan-Mar dan Jul-Sept 2011 4. Ul. Semester (rental dan ft copy soal kelas 3-6 Okt-Des 2011 5. Kegiatan Ul. Dan Ujian Jan-Mar 2011 6. Kegiatan Ul, Ujian Sekolah, UN dan Ul.Semester Apr-Jun 2012 7. Ul.Semester kls 2-6 Okt-Des 2012 8. Ul.harian 1-6 Jan-Mar dan Jul-Sept 2013 9. Kegiatan US, UN, Ul. Smster dan penulisan Ijazah Apr-Jun 2013 10. Kegiatan Ul.Semester (rental dan ft copy soal) dan penulisan rapor Okt-Des 2013	1 4 1 1 1 4 1 2 4 1	1.024.000 2.445.000 550.000 1.333.500 370.000 2.723.000 1.017.000 555.000 3.270.000 1.944.000
4	38	Pengembangan sistem penilaian (kegiatan Ul. Dan Ujian)	1. Kegiatan Ul dan ujian (rental soal dan ft copy, konsumsi dan transpor, penulisan rapor dan penulisan ijazah Apr-Jun 2011 2. Pelaksanaan UAS, UN, penulisan rapor dan konsumsi Apr-Jun 2012 3. Ul. Semester (rental dan penggandaan soal, insentif pengawas dan konsumsi Okt-Des 2012 4. Pengadaan sarana proses belajar Apr-Jun 2013	1 6 6 3	2.002.000 1.845.000 2.067.000 1.400.000

- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari disekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU	
				ME	JML (Rp)
1	12	Pembelian bahan-bahan habis pakai	1. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2011 2. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2012	1 1	5.470.000 13.481.000

			3. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2013	1	9.995.000
2	13	Pembelian bahan-bahan habis pakai	1. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2011	1	10.173.775
			2. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2012	1	23.721.350
			3. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2013	1	39.644.300
3	24	Pembelian bahan-bahan habis pakai	1. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2011	1	4.771.000
			2. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2012	1	9.057.500
			3. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jan-Des 2013	1	10.935.500
4	38	Pembelian bahan-bahan habis pakai	1. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Apr-Jun 2011	1	1.792.250
			2. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jul-Sept 2011	1	2.110.750
			3. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Okt-Des 2011	1	1.810.000
			4. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jul-Sept 2012	1	1.860.000
			5. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Okt-Des 2012	1	2.658.000
			6. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Apr-Jun 2013	1	1.400.000
			7. Pembelian bahan habis pakai, langganan koran Jul-Sept 2013	1	2.017.000

f. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut membutuhkan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli gengset.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Pembinaan langganan daya dan jasa	1. Pemasangan KWH baru dan Voucher pulsa modem Jan-Mar 2012	1	6.020.000
			2. Pembayaran rekening listrik Apr-Des dan Voucher 9 Bulan Apr-Des 2012	3	2.900.400
			3. Pembayaran rekening listrik Jan-Des dan Voucher 12 Bulan Jan-Des 2013	4	4.438.140

2	13	Pembinaan langganan daya dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian pulsa internet Jan-Des 2011 2. Pembelian Pulsa internet Jan-des 2012 3. Pembelian Pulsa internet Jan-des 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 4 4 4 	<ol style="list-style-type: none"> 1.200.000 1.200.000 1.200.000
3	24	Pembinaan langganan daya dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian voucer Jan-Jun 2012 2. Pembelian voucer 3 Bulan Jul-Sept 2012 3. Pembelian voucer 3 bulan Okt-Des 2012 4. Pembelian voucer 6 bln Jan-Des 2013 5. Pembelian Modem Okt-Des 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 6 3 3 12 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1.500.000 690.000 750.000 3.000.000 400.000
4	38	Pembiayaan langganan daya dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langganan daya dan jasa Jan-Jun 2013 2. Langganan daya dan jasa Juli-Sept 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 2 1 	<ol style="list-style-type: none"> 2.400.000 2.450.000

g. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Pembiayaan perawatan sekolah/pengembangan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan papan nama sekolah (semen, pasir, bata merah dll termasuk upah tukang dl) Jan-Mar 2011 2. Perbaikan kursi, meja guru dll Apr-Jun 3. Pembelian Bahan pembuatan pagar teras dan kelengkapan sekolah termasuk ongkos tukang Jul-Sept 2011 4. Pembelian Cat Yoko, Aries dan upah tukang 2 org Okt-Des 2011 5. Perawatan sekolah (papan data) Jan-Mar 2012 6. Pengecatan sekolah dan perbaikan WC termasuk ongkos tukang Apr-Jun 2012 7. Pembelian perbaikan sekolah Jul-Sept 8. Pembelian bahan perbaikan sekolah dan ongkos tukang Okt-Des 2012 9. Pembelian bahan perawatan sekolah dan ongkos tukang Jan-Mar dan Jul-Sep 2013 10. Pembelian bahan perawatan sekolah dan ongkis tukang Okt-Des 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1 1 1 1 9 1 1 1 2 1 	<ol style="list-style-type: none"> 6.850.000 2.920.000 4.910.000 1.625.000 5.400.000 7.440.000 8.080.000 5.000.000 16.800.000 8.860.000
2	13	Pembiayaan perawatan sekolah/pengembangan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian bahan perawatan sekolah dan upah tukang Jan-Mar 2011 2. Pembelian bahan perawatan sekolah dan upah tukang Apr-Des 2011 3. Pembelian bahan Cat tembok Aries dan sejenisnya serta ongkos tukang Jan-Des 	<ol style="list-style-type: none"> 1 3 1 	<ol style="list-style-type: none"> 2.810.000 4.665.000 11.725.500

			2012	1	11.720.000
			4. Pembelian bahan Cat tembok Aries dan sejenisnya serta ongkos tukang Jan-Des 2013		
3	24	Pembiayaan perawatan sekolah/pengembangan sarana dan prasarana	1. Pembelian cat tembok dan kelengkapan sarana lain untuk perawatan sekolah Jan-Mar 2011	1	1.350.000
			2. Pembelian cat tembok dan kelengkapan sarana lain untuk perawatan sekolah Apr-Jun 2011	1	1.455.000
			3. Pembelian bahan cat termasuk ongkos tukang Jul-Sept 2011	1	2.985.000
			4. Pembelian semen, pasir, batu gunung, ongkos tukang perbaikan sumur Okt-Des 2011	1	2.650.000
			5. Pembelian bahan untuk perbaikan penggalian dan perbaikan WC serta papan data Jan-Mar 2012	1	2.220.000
			6. Pembelian papan data dan kelengkapan lain spt papan slogan Jan-Des 2012	1	10.315.000
			7. Pembelian bahan Cat, papan nama sekolah dan upah tukang Jan-Mar 2013	1	3.770.000
			8. Pembelian tripleks, slock dan grendel Apr-Jun 2013	1	450.000
			9. Perbaikan kalender pend Jul-Sept 2013	1	100.000
			10. Pembelian bahan semen dan cat serta ongkos kerja Okt-Des 2013	1	1.640.000
4	38	Pembiayaan perawatan sekolah/pengembangan sarana dan prasarana	1. Pembelian sarana perbaikan sekolah (cat, kuas dll) Jan-Mar 2011	1	1.060.000
			2. Pembuatan papan nama sekolah, perbaikan lantai, pengecatan, perbaikan kunci Apr-Jun 2011	1	3.563.000
			3. Pembelian sarana perbaikan sekolah (cat, kuas dll) Jan-Mar 2012	1	1.350.000
			4. Perbaikan lantai, kunci pintu kls dan pengecatan sekolah Apr-Jun 2012	1	2.000.000
			5. Perbaikan kunci pintu kelas dan pengadaan bendera Jul-Sept 2012	1	250.000
			6. Perbaikan meja kursi kelas, cat, kuas dan pintu Jan-Mar 2013	1	2.135.000
			7. Pembelian cat, kuas dan minyak cat Apr-Sept 2013	2	750.000

- h. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorer tenaga kependidikan	1. Transpor GTT 6 bulan Jan-Des 2011 2. Insentif Bendahara Jan-Des 2011 3. Transpor Petugas Kebersihan 3 bulan Okt-Des 2011 4. Transpor Guru Honorer Jan-Sept 2012 5. Transpor Petugas Kebersihan 6 bulan Jan-Jun 2012 6. Transpor Guru Honorer Penjaskes 12 bulan Jan-Des 2013 7. Transpor Guru Honorer B.Ingggris 12 bulan Jan-Des 2013 8. Petugas kebersihan Jan-Des 2013 9. Transpor Operator Komputer Apr-Jun 2013 10. Operator Komputer Jul-Sept 2013 11. Operator Komputer Okt-Des 2013	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.850.000 1.200.000 900.000 2.700.000 1.500.000 6.000.000 3.600.000 3.000.000 750.000 2.100.000 750.000
2	13	Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorer tenaga kependidikan	Pada Tahun 2011 s/d 2013 tidak ada guru honorer.	-	-
3	24	Pembayaran Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorer tenaga kependidikan	1. Transpor GTT 3 Bulan Jan-Jun 2011 2. Insentif bendahara Jan-Jun 2011 3. Transpor GTT Jul-Sept 2011 4. Transpor opertor Komputer Jul-Des 2011 5. Insentif Bendahara Jul-Des 2011 6. Operator Komputer Jan-Des 2012 7. Petugas kebersihan Jan-Des 2012 8. Operator Komputer Jan-Des 2013 9. Petugas kebersihan Jan-Des 2013	1 1 1 1 1 1 1 1 1	750.000 200.000 300.000 450.000 250.000 4.000.000 1.200.000 9.000.000 1.200.000
4	38		1. Honor GTT @200.000 Jan-Mar 2011 2. Insentif Bendahara@100.000 Jan-Des 11 3. Honor tenaga kepend Apr-Des 2011 4. Honor GTT @300.000 Jan-Mar 2012 5. Insentif Bendahara@200.000 Jan-Des 12 6. Honor tenaga kepend @300.000 Jan-Des 2012 7. Honor tenaga administrasi @300.000 Apr-Des 2012 8. Insentif Bendahara@200.000 Jan-Sept 13 9. Honor tenaga kepend @300.000 Jan-Sept 2013 10. Honor tenaga administrasi @300.000 Jan-Sept 2013	3 12 9 3 12 12 9 9 9 9	600.000 1.200.000 1.800.000 900.000 2.400.000 3.600.000 2.700.000 1.800.000 2.700.000 2.700.000

- i. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.	1. Transpor Peserta KKKS dan KKG dan konsumsi 10 Org Jan-Mar dan Jul-Sept 2011	6	5.250.000
			2. Transpor peserta KKG 11 org guru dan konsumsi April-Juni 2011	3	2.475.000
			3. Transpor peserta KKKS dan KKG 10 org Okt-Des 2011	3	3.210.000
			4. Transpor KKKS 1 org dan 10 Org guru KKG serta konsumsi Jan-Des 2012	24	19.080.000
			5. Transpor KKKS 1 org dan 10 Org guru KKG serta konsumsi Jan-Mar 2013	6	4.770.000
			6. Transpor KKG/KKKS 11 org guru dan konsumsi Apr-Jun 2013	3	2.640.000
			7. Transpor KKG 10 org guru dan konsumsi Jul-Des 2013	9	7.050.000
2	13	Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.	1. Transpor peserta KKG 8 org guru dan 1 org KKKS konsumsi Jan-Des 2011	12	7.800.000
			2. Transpor peserta KKG 8 org guru dan 1 org KKKS konsumsi Jan-Des 2012	12	7.800.000
			3. Transpor peserta KKG 8 org guru dan 1 org KKKS konsumsi Jan-Des 2013	12	7.800.000
3	24	Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.	1. Transpor peserta KKG 10 org guru dan konsumsi Jan-Mar 2011	3	3.450.000
			2. Transpor KKKS 1 org dan peserta KKG 10 org serta pengawas 1 org dan konsumsi Apr-Jun 2011	6	2.550.000
			3. Transpor peserta KKG dan KKKS Jul-Des 2011	3	2.450.000
			4. Transpor KKKS 1 org dan 10 org peserta KKG serta konsumsi Jan-Jun 2012	1	9.540.000
			5. Transpor KKKS /KKG 11 org guru dan konsumsi Jul-Sept 2012	6	4.620.000
			6. Transpor KKKS 1 org dan 9 org guru peserta KKG Okt-Des 2012	3	2.250.000
			7. Transpor pelatihan Senam Okt-Des 2012	1	300.000
			8. Transpor peserta KKG 10 org guru dan konsumsi Jan-Mar 2013	3	3.600.000

			9. Transpor KKKS 1 org dan 8 peserta KKG serta konsumsi Apr-Jun 2013	3	2.865.000
			10. Transpor KKKS 1 org dan 9 Guru peserta KKG serta konsumsi Jul-Sept 2013	3	1.845.000
			11. Transpor KKG 8 org guru dan transpor pembhs kur dan ketikanya Okt-Des 2013	3	2.350.000
4	38	Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGM P dan KKKS/MK KS.	1. Transpor KKG dan KKS @50.000 8 org dan konsumsi Jan-Mar 2011	3	2.400.000
			2. Transpor KKS dan KKG 8 guru @45.000 dan konsumsi Apr-Jun 2011	3	1.220.000
			3. Transpor KKS dan KKG 8 guru @30.000 dan konsumsi Jul-Des 2011	5	1.890.000
			4. Transpor KKS dan KKG 8 guru @30.000 dan konsumsi Jan-Jun 2012	5	2.270.000
			5. Transpor KKS dan KKG 8 guru @40.000 dan konsumsi Jul-Sept 2012	6	3.120.000
			6. Transpor KKS dan KKG 9 guru @33.750 dan konsumsi Jan-Sept 2013	9	3.780.000

- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan kesekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll.).

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Bantuan biaya bagi siswa miskin	1. Membeli seragam sekolah bagi siswa miskin 3 psg Apr-Jun 2012 2. Membantu siswa miskin pas foto 28 siswa kls 1(satu)@20.000 Okt-Des 2012 3. Transpor 6 org siswa miskin @30.000 periode Apr-Jun 2013	3 28 3	525.000 560.000 540.000
2	13	Bantuan biaya bagi siswa miskin	Tidak ada dalam laporan dana BOS	-	-
3	24	Bantuan biaya bagi siswa miskin	1. Membantu siswa miskin pas foto 26 org kelas 1 @22.500 Apr-Jun 2013	26	585.000
4	38	Bantuan biaya bagi siswa miskin	1. Membelikan pakaian siswa miskin 20 org @150.000	20	3.000.000

- k. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flas disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank/PT Pos.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK	1. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2011	1	810.000
			2. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2011	1	807.000
			3. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2011	1	937.000
			4. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2011	1	629.500
			5. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2012	1	1.382.000
			6. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2012	1	1.395.000
			7. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2012	1	1.275.300
			8. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2012	1	1.261.000
			9. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2013	1	1.310.000
			10. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2013	1	1.280.260
			11. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2013	1	1.228.200
			12. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2013	1	1.260.000
2	13	Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK	1. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2011	1	867.125
			2. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2011	1	817.625
			3. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2011	1	946.050
			4. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2011	1	817.000
			5. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2012	1	1.039.850
			6. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2012	1	1.209.550

			7. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2012	1	1.112.350
			8. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2012	1	1.208.900
			9. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2013	1	1.036.600
			10. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2013	1	1.048.600
			11. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2013	1	1.046.600
			12. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2013	1	950.000
3	24	Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK.	1. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2011	1	810.000
			2. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2011	1	824.500
			3. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2011	1	1.044.500
			4. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2011	1	1.058.000
			5. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2012	1	1.135.000
			6. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2012	1	1.050.000
			7. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2012	1	1.036.500
			8. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2012	1	1.083.000
			9. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2013	1	1.083.000
			10. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2013	1	1.480.000
			11. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2013	1	1.230.000
			12. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2013	1	1.233.000

4	38	Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK.	1. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2011	1	858.000
			2. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2011	1	711.000
			3. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2011	1	382.000
			4. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2011	1	703.250
			5. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Mar 2012	1	1.090.000
			6. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Apr-Jun 2012	1	1.960.000
			7. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jul-Sept 2012	1	1.345.000
			8. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Okt-Des 2012	1	655.000
			9. Pembuatan pelaporan pengelolaan dana BOS dll Jan-Sept 2013	1	3.705.000

1. Pembelian perangkat komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran.

NO	SD	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	VOLU ME	JML (Rp)
1	12	Pembelian perangkat komputer dan printer untuk untuk KBM siswa	1. Pembelian Laptop Toshiba periode Jul-Sept 2012	1	7.000.000
			2. Printer 1 buah Jul-Sept 2012	1	900.000
2	13	Pembelian perangkat komputer dan printer untuk untuk KBM siswa	1. Printer Komputer Jul-Sept 2012	1	1.100.000
			2. Flash dish 4 giga Jul-Sept 2013@150.000	3	450.000
3	24	Pembelian perangkat komputer dan printer untuk untuk KBM siswa	1. Pembelian Laptop Merk Acer Jul-Sept 2013	1	4.600.000
			2. Printer Merk Epson Okt-Des 2013	1	950.000
			3. Mouse (tanpa kabel) Okt-Des 2013	1	150.000

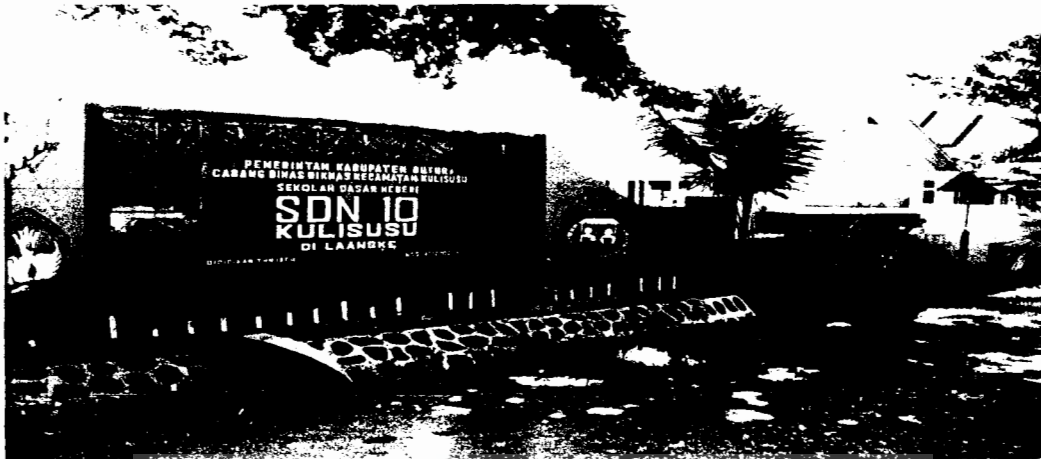
4	38	Pembelian perangkat komputer dan printer untuk KBM siswa	1. Pengadaan mesin stensil Jan-Mar 2013 2. Pengadaan printer Jan-Mar 2013	1 1	900.000 900.000
---	----	--	--	--------	--------------------

m. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah dipenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebel sekolah (Ditjen Dikdas, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian dan data dari sekolah tempat penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap triwulan dalam satu tahun untuk laporan dana bos tidak terdapat sisa/nihil untuk hasil pelaporan berarti dana BOS terpakai semuanya. Dan berdasarkan kajian laporan pertanggung jawaban dan penggunaan dana BOS dari 22 Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara telah terungkap bahwa penggunaan dana tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman/panduan BOS antara lain peruntukan untuk pemberian transportasi bagi siswa miskin.

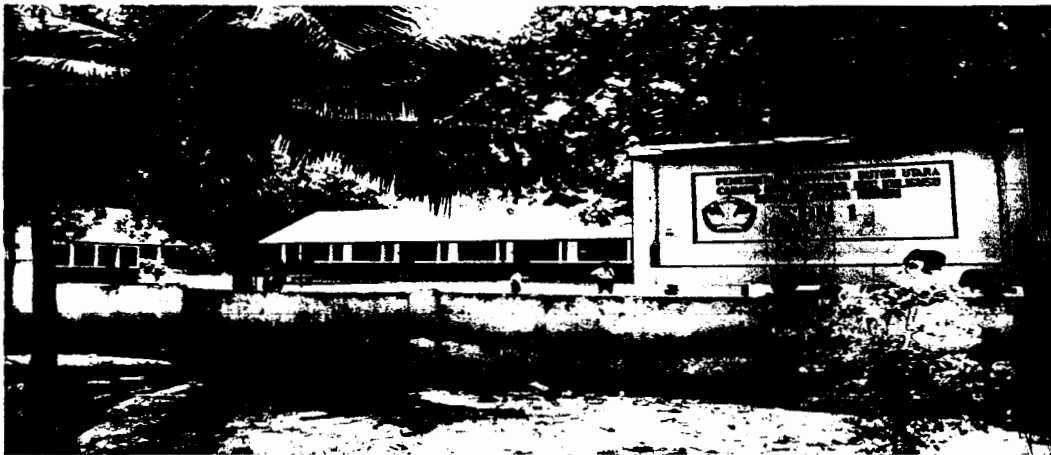


Lampiran : Foto Penelitian di SDN 10 Kulisusu.





Lampiran : Foto Penelitian di SDN 13 Kulisusu.



Lampiran : Foto Penelitian di SDN 38 Kulisusu





UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Kendari

Jl. A.H. Nasution No. 1 Kelurahan Kambu, Kec. Poasia Kendari 93232

Telepon: 0401-3195919, Faximile: 0401-3190644

Laman: ut-kendari@ut.ac.id

UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 135/UN31.48/LL/2014
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

25 Maret 2014

Kepada Yth.

Kepala Kesbang Kabupaten Buton Utara

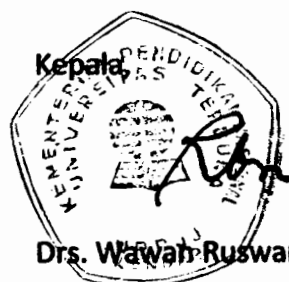
Di –

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan penyelesaian studi Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Arman Ani
No. Stambuk : 018416841
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara
Angkatan : 2012.2
Waktu Penelitian : Maret s/d Juni 2014

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Drs. Wawan Ruswanto, M.Si
NIP. 19630715199103 1 006



SURAT REKOMENDASI
NO.045.2/.37.....

Menunjuk surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Kendari Nomor: 135/UN31.48/LL/2014 Perihal Izin Penelitian yang ditujukan pada Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Buton Utara, maka bersama ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Utara memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ARMAN ANI
N I M : 018416841
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul Penelitian : "Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara"
Lokasi Penelitian : SDN 10, SDN 12, SDN 13 dan SDN 38 di Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara
Waktu Penelitian : Maret s/d Juni 2014.

Sehubungan hal tersebut di atas kepada peneliti/Survei di harapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati peraturan perundang-undangan, Agama dan Adat Istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain selain penelitian;
3. Adakan koordiasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama melaksanakan kegiatan;
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan/ penelitian agar menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Buton Utara Cq. Ka. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Buton Utara.

Kepada semua pihak diharapkan bantuannya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Buranga, 10 April 2014

A.n. Bupati Buton Utara
Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Buton Utara,



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara di Buranga;
3. Camat Kulisusu di Kulisusu;
4. KUPTD Pendidikan Kec. Kulisusu di Kulisusu;
5. Kepala SDN 10 di Kulisusu;
6. Kepala SDN 12 di Kulisusu;
7. Kepala SDN 13 di Kulisusu;
8. Kepala SDN 38 di Kulisusu;
9. Mahasiswa yang bersangkutan;
10. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN
KUPTD KECAMATAN KULISUSU**

Alamat : Jl..... Telp. Kode Pos 93672

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : ...422/101.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, KUPTD Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara, menerangkan bahwa :

Nama : ARMAN ANI, S.Pd

Tempat tanggal lahir : Wapala, 3 September 1980

Nomor Stambuk : 018416841

Program Study : Magister Administrasi Publik (MAP)

Angkatan : 2012.2

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar-benar mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ 83/Kendari yang telah melaksanakan penelitian di SDN 13 Kulisusu, SDN 23 Kulisusu, SDN 12 Kulisusu dan SDN 15 Kulisusu dari tanggal 7 April sampai dengan 24 Mei 2014 pada SDN yang telah ditentukan di lingkungan KUPTD Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

26 Mei 2014
KUPTD Kecamatan Kulisusu
DINAS PENDIDIKAN
UPTKEC. KULISUSU
BUTON UTARA
RAMUNDUS SUPARIO, S.Pd.
NIP. 19680107 199212 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis tesis ini bernama Arman Ani Lahir di Wapala, 3 September 1980 merupakan anak ke-3 dari 6 bersaudara pasangan Bapak La Ani dan Ibu Wa Utu. Penulis Beralamat di Jalan La Ode Gure No. 29 Kelurahan Wandaka Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Adapun Riwayat pendidikan penulis adalah dari SD Negeri 4 Lipu (SDN 19 Kulisusu Sekarang) Kecamatan Kulisusu lulus tahun 1992, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kulisusu dan lulus tahun 1995. Kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Kulisusu Kabupaten Muna pada saat itu dan lulus tahun 1998 dengan jurusan IPS.

Sarjana Strata 1 di raih pada tahun 2003 di Universitas Haluoleo Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Pendidikan Bahasa Inggris Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Seni. Pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan pasca sarjana Jurusan Magister Administrasi Publik Di Universitas Terbuka UPBJJ Kendari.

Penulis melepas masa lajangnya tepatnya diusia ke-32 Tahun dengan seorang Perempuan yang bernama Fitriati, AMK anak dari pasangan Bapak H. Lamuza dengan Hj. Samriah dan penulis dikaruniai seorang putri yang bernama Adelia Maisarah Arman tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2013.

Riwayat pekerjaan bermula sebagai guru honorer di SMP Negeri 1 Kulisusu tahun 2004 selama 6 bulan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2005 di Pasar Wajo Kabupaten Buton selama 3 tahun tepatnya bertugas sebagai abdi negara di SMP Negeri 1 Sampolawa. Setelah Kabupaten Buton Utara direstui sebagai Daerah Otonomi Baru Tahun 2007, maka pada tahun 2008 penulis hijrah ketanah kelahiran untuk mengabdikan diri kepada orang tua, keluarga dan Negeri tercinta diLipu Tinadeakono Sara tepatnya di SMA Negeri 1 Kulisusu sampai sekarang dan diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan diikuti penulis baik tingkat Kabupaten, Propinsi dan terakhir pada tingkat Nasional yaitu mengikuti Workshop Kepramukaan yang Terimplementasi pada Kurikulum 2013 di Kota Bandung Jawa Barat pada Tahun 2014.